

**PERAN POLITIK IDENTITAS ETNIS (STUDI KASUS PILKADES DI
DESA SIRU KECAMATAN LEMBOR KABUPATEN
MANGGARAI BARAT)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
Lukman Yunus
10538 3110 14

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
AGUSTUS 2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : **LUKMAN YUNUS**
Stambuk : 10538 3110 14
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Dengan Judul : **Peran Politik Identitas Etnis (Studi Kasus Pilkades di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat)**

Setelah diperiksa dan diteliti ulang, Skripsi ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Nawi, M.Pd.


Koharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Mengetahui

Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi
FKIP Unismuh Makassar


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934


Dr. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama LUKMAN YUNUS, NIM 10538 3110 14 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 145 Tahun 1439 H/2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018.

Makassar, 04 Dzulhijjah 1439 H
16 Agustus 2018 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdurrahman Rantyo, S.E., M.A.
2. Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
3. Sekretaris : Dr. Babirubatu, S.Pd.
4. Dosen Penguji : Dr. H. Jamus Madani, M.Si.
2. Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
3. Dr. H. Budi Setiawati, M.Si.
4. Risfaisal, S.Pd., M.Pd.

Disahkan Oleh :
Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM : 900 934

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN
(QS. AL-INSYIRAH 94 : AYAT 6)*

Kupersembahkan karya ini untuk ayah dan ibuku tercinta,
saudara-saudaraku, keluarga, sahabat serta seluruh kawan-kawanku.

Terima kasih do'a dan motivasinya selama ini.

ABSTRAK

Lukman Yunus. 2014. Peran Politik Identitas Etnis (Studi Kasus Pilkades di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat). Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Muhammad Nawir dan Pembimbing II Kaharuddin.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah pada tahun politik khususnya pada masyarakat multi etnis politik identitas acap kali mewarnai suasana perpolitikan. Di desa Siru bisa dikatakan multi etnis karena memiliki empat etnis yaitu Ndahe, Tere, Jombok dan Pa'ang, dan dari ke empat etnis tersebut pada kontestasi pilkades memiliki keterwakilan yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Realitas menunjukkan bahwa terdapat salah satu etnis yaitu Ndahe secara kuantitas penduduknya mayoritas lebih banyak dan selama penyelenggaraan pilkades etnis tersebut keterwakilannya lebih banyak menempati jabatan kepala desa. Maka kemudian ada asumsi yang menyatakan mungkinkah terdapat peran politik identitas etnis dalam strategi kemenangan calon kepala desa, sementara jika melihat gejala politik etnik di beberapa daerah cenderung berpotensi konflik kepentingan akibat dari tumbuhnya etnosentrisme dalam masing-masing etnis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa peran politik identitas etnis dan bagaimana dampak politik identitas etnis dalam pilkades di desa Siru kecamatan Lembor kabupaten Manggarai Barat. Informan ditentukan secara *purposive sampling*, berdasarkan karakteristik informan yang ditetapkan yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui berbagai tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, waktu dan teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran politik identitas di desa Siru acap kali dijadikan jargon oleh masing-masing kontestan sebagai basis mencapai kekuasaan atau jabatan kepala desa. Strategi ini dinilai sukses dengan melihat kondisi masyarakat desa Siru yang multi etnis kemudian dimanfaatkan sebagai basis dalam menjaring massa. Strategi yang metodologis dan sistemik akhirnya kecenderungan masyarakat dalam memilih kepala desa adalah didasarkan pada kesamaan etnis dengan masing-masing calon kepala desa. Adapun dampak dari politik identitas etnik ini adalah terjadinya konflik yang tergolong ke dalam konflik kepentingan. Hasil konstruksi identitas dalam kontestasi pilkades memunculkan suatu situasi yaitu individu-individu mengidentifikasi dirinya dengan sesama etnis sehingga lahir suatu sikap etnosentrisme dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Konflik tersebut tergolong konflik ringan dan tidak bertahan lama.

Kata Kunci : Politik Identitas, Etnis, Pilkades.

KATA PENGANTAR

Allah Maha Penyayang dan Pengasih, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu, Sang Khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan kepada para keluarga yang tak hentinya memberi motivasi dan selalu menemani dengan candanya.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada; Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Drs. H. Nurdin, M.Pd.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Dr. Muhammad Nawir, M.Pd. selaku pembimbing I dan Bapak Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D selaku pembimbing II, serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Ucapan terima kasih yang juga penulis ucapkan kepada teman-teman yang selalu menemani dalam suka dan duka, sahabat-sahabatku terkasih serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi atas kebersamaan, motivasi, saran dan bantuannya kepada penulis yang telah memberi pelangi dalam hidupku.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak

akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca. terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makasaar, Agustuss 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	8
1. Hasil Penelitian yang Relevan	8
2. Peran Politik Identitas	9
3. Konsep mengenai Etnisitas	14

4. Gejala Politik Etnis	21
5. Aturan dan Konsep Pemilihan Kepala Desa	23
6. Landasan Teori.....	32
B. Kerangka Konsep.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian.....	45
D. Fokus Penelitian	46
E. Instrumen Penelitian.....	47
F. Jenis dan Sumber Data	48
G. Teknik Pengumpulan Data.....	49
H. Teknik Analisis Data.....	50
I. Teknik Keabsahan Data	52

BAB IV DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN DAN DESKRIPSI KHUSUS LATAR PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Daerah Penelitian.....	55
1. Sejarah Singkat Manggarai Barat.....	55
2. Kondisi Geografis dan Iklim.....	57
3. Topografi, Geologi dan Hidrologi.....	58
4. Kondisi Demografi.....	59
B. Deskripsi Khusus Desa Siru Sebagai Latar Penelitian.....	64
1. Sejarah Singkat Desa Siru	64

2. Tingkat Pendidikan	65
3. Mata Pencaharian	66
4. Kondisi Sosial Ekonomi.....	67
5. Kehidupan Keberagamaan	69
6. Awal Mula Pelaksanaan Pilkades	70

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	71
1. Peran Politik Identitas Etnis dalam Pilkades di Desa Siru.....	71
2. Dampak Politik Identitas Etnis dalam Pilkades di Desa Siru	79
B. Pembahasan.....	83
1. Peran Politik Identitas Etnis dalam Pilkades di Desa Siru.....	83
2. Dampak Politik Identitas Etnis dalam Pilkades di Desa Siru	89

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	92
B. Saran.....	93
Daftar Pustaka	94
Lampiran	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel. 1.1 Data dan sumber data.....	48
Tabel. 1.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio tahun 2017.....	59
Tabel. 1.3 Rasio jenis kelamin menurut kelompok umur	60
Tabel. 1.4 Jumlah penduduk menurut agama dan jenis kelamin	61
Tabel. 1.5 Migrasi masuk penduduk per kecamatan semester 1 (Januari-Juni) 2017.....	62
Tabel. 1.6 Migrasi keluar penduduk per kecamatan semester 1 (Januari-Juni) 2017.....	63
Tabel. 1.7 Tingkat pendidikan di desa Siru.....	65
Tabel. 1.8 Mata pencaharian masyarakat desa Siru	66
Tabel. 1.9 Pemilikan lahan pertanian pangan desa Siru.....	68
Tabel.1.10 Pemilikan lahan perkebunan desa Siru	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar. 1.1 Bagan kerangka piker.....	44
Gambar. 1.2 Siklus pengumpulan data dan analisis data.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lembar Observasi	98
2. Pedoman Wawancara	99
3. Data Informan dalam Wawancara.....	100
4. Data Hasil Wawancara.....	102
5. Poto-poto	109
6. Administrasi Penelitian	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik identitas menurut Abdilah (2002) merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan atau bahasa. Darity (2005) mendefinisikan bahwa etnis adalah kelompok yang berbeda dari kelompok yang lain dalam suatu masyarakat dilihat dari aspek budaya. Dengan kata lain, etnik adalah kelompok yang memiliki ciri-ciri budaya yang membedakannya dari kelompok yang lain. Ciri khas budaya yang membedakannya dari kelompok etnis yang lain terlihat dalam aspek kekhasan sejarah, nenek moyang, bahasa dan simbol-simbol yang lain seperti pakaian, agama, dan tradisi.

Identitas bukan hanya persoalan *belonging* semata, tetapi saat ini identitas bertransformasi sebagai alat politik dalam menarik simpati publik. Semakin lama, identitas menjadi alat komoditi bagi kandidat yang maju dalam pemilihan khususnya dalam area lokal. Kontestasi demokrasi yang sifatnya lokal membuat banyaknya kandidat yang mengusung tema etnis dengan dalih mewakili kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan kandidat yang berasal dari kelompok tertentu menggunakan sentimen etnis untuk mendapat dukungan dari pemilih.

Pada kontestasi demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal, peran politik identitas etnis memiliki peran andil sebagai basis mencapai kekuasaan.

Politik identitas etnis dalam istilah lain dipolitisasi untuk kepentingan politik, tujuannya adalah supaya setiap individu dalam menentukan pilihan di dasarkan pada pengidentifikasian kesamaan etnis, dalam kata lain program-program yang dikampanyekan oleh kontestan tidak menjadi bahan referensi utama pemilih. Pemandangan seperti ini dalam kontestasi demokrasi sudah menjadi hal yang lumrah.

Peran politik identitas etnis dalam merebut kekuasaan politik pada prakteknya dinilai berhasil, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran etnisitas sebagai jargon dalam mempengaruhi pemilih menjadi bagian terpenting dalam kontestasi politik. Eksistensi etnis oleh sebagian politisi dimanfaatkan demi mencapai kekuasaan. Dalam hal ini, komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi dengan masyarakatnya cenderung menekankan terbentuknya suatu persepsi yang sama. Realitas kontribusi etnis dalam politik, disadari atau tidak sudah membudaya dalam setiap ajang kontestasi demokrasi. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa dampak dari peran politik identitas yang diterapkan menimbulkan disintegrasi atau perpecahan dalam kelompok masyarakat. Hal tersebut oleh sebagian pemikir seperti Fahri Hamzah dinilai sebagai cacat atau kemunduran dalam berdemokrasi.

Melihat fenomena yang terjadi demikian, ada penguatan dan pengentalan identitas sebagai basis perebutan kekuasaan politik. Politisasi identitas ini terjadi sebab identitas dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan bagi elit-elit politik. Politik identitas pada awalnya berangkat dari persamaan baik nasib, teritorial dan sebagainya, telah dijadikan instrumen untuk mendapatkan simpati publik. Dari

sini dapat dilihat bahwa politik identitas mengalami transformasi pemaknaan identitas karena proses identitas dibuat untuk kepentingan orang-orang yang membuatnya. Segala elemen-elemen etnisitas dapat menjadi kekuatan untuk memperoleh legitimasi dan menghegemoni masyarakat. Elemen etnis bukan lagi sesuatu yang tidak penting dan tertinggal tetapi justru menjadi kekuatan yang ampuh dalam pemilihan khususnya kontestasi di tingkat lokal.

Politik identitas etnis sudah menjadi bahan kajian, baik di kalangan akademisi maupun non akademisi. Perhatian terhadap peran politik identitas etnis, menurut penulis merasa sangat perlu karena eksistensinya dalam kontestasi demokrasi memiliki implikasi yang luas. Secara struktural, etnis merupakan kesatuan sistem dimana di dalamnya terdapat individu-individu yang memiliki kedekatan emosional oleh garis keturunan yang sama. Realitasnya adalah kontestan yang menjadi perwakilan dari salah satu etnis yang besar akan mendominasi perolehan suara terbanyak. Hal tersebut tidak menyalahi aturan karena prosesnya berlandaskan Undang-Undang atau mengikuti asas demokrasi yakni pemilihan umum. Kontestan yang memperoleh suara terbanyak akan menduduki jabatan sebagai pemimpin yang sah.

Desa Siru menjadi salah satu desa yang memiliki keragaman etnis, yakni Ndahe, Tere, Jombok dan Pa'ang. Dari ke empat etnis tersebut, Ndahe menjadi etnis yang memiliki populasi penduduk terbanyak. Eksistensi dari keempat etnis tersebut sudah ada sejak zaman dulu dan berkembang sampai sekarang. Keberadaan etnis di desa Siru, keempatnya memiliki peranan penting dalam aspek politik.

Pada kontestasi demokrasi pilkades di desa Siru, etnis Ndahe menjadi etnis yang keterwakilannya menduduki jabatan sebagai kepala desa Siru terbanyak sepanjang pesta demokrasi di desa tersebut. Jika melihat fakta, etnis Ndahe merupakan etnis yang memiliki populasi penduduk terbanyak dibandingkan dengan etnis lainnya. Strategi kemenangan yang menjadi instrumen kontestan perwakilan etnis Ndahe, merasa perlu diteliti untuk di ekspos dalam karya ilmiah ini. Perhatian terkait peran politik identitas etnis apakah ikut serta dalam kesuksesan etnis Ndahe sehingga mendominasi dalam menduduki jabatan sebagai kepala desa Siru. Sudah menjadi hal yang lumrah dalam kontestasi lokal, bahwa etnis sebagai komoditas dalam perebutan kekuasaan. Politisasi etnis memungkinkan bahwa visi misi maupun program kerja yang dikampanyekan oleh kontestan boleh jadi tidak memiliki pengaruh yang besar dalam mempengaruhi pemilih melainkan kesamaan etnis adalah referensi utama pemilih.

Di dalam kontestasi pikades, ada dua hal yang menjadi orientasi pemilih sebagai referensi dalam menentukan pilihan. Pertama berdasarkan orientasi *policy-problem solving* dan kedua berdasarkan orientasi ideologi. Orientasi yang pertama, perilaku pemilih cenderung objektif karena mementingkan sejauh mana program kerja atau kepekaan sosial kontestan. Sementara orientasi yang kedua, pemilih sangat mementingkan ideologi kontestan sehingga cenderung subjektif. Perilaku pemilih kedua ini memposisikan agama, etnis, bahasa dan budaya kontestan sebagai acuan. Dari kedua pendekatan tersebut, bisa dijadikan landasan dalam melihat perilaku pemilih.

Pada saat pra pilkades, antusiasme masyarakat khususnya di desa Siru sangat luar biasa. Hal tersebut ditandai dengan perbincangan–perbincangan mengenai kontestasi pilkades menjadi obrolan yang serius. Sangat penting bagi mereka membangun komunikasi seputar politik skala desa tersebut. Pada saat tersebut komunikasi dalam ruang lingkup etnis tertentu menjadi terintegrasi khususnya kelompok yang memiliki kesamaan etnis. Kontestan, tim pemenangan dan masyarakat pada masing-masing etnis menjadi bagian yang integral tak terpisahkan. Pada saat itu juga, penyatuan persepsi mulai terbentuk oleh karena memiliki komitmen dan dorongan kepentingan yang sama. Sangat menarik jika mengkaji dan menganalisis seperti apa peran politik identitas etnis di desa Siru dalam perebutan kekuasaan untuk jabatan kepala desa. Selain itu juga akan mengkaji bagaimana dampak dari praktek politik identitas etnis di desa tersebut.

Dari ulasan di atas, penulis mengambil judul penelitian “Peran Politik Identitas Etnis (Studi Kasus Pilkades di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis akan merumuskan masalah dengan maksud sebagai batasan atau acuan dalam melakukan penelitian sehingga memudahkan penulisan karya ilmiah.

1. Bagaimana peran politik identitas etnis dalam pilkades di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat?
2. Bagaimana dampak politik identitas etnis dalam pilkades di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, berikut ini merupakan tujuan penulisan karya ilmiah:

1. Untuk mengetahui peran politik identitas etnis dalam pilkades di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat.
2. Untuk mengetahui dampak politik identitas etnis dalam pilkades di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Karya ilmiah ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam domain politik tentang peran politik etnis dalam politik lokal skala desa, terutama untuk pengembangan sosiologi politik (politik identitas/politik etnis).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pendidikan di dalam mewujudkan kesadaran demokrasi yang aman dan tentram, tentu dalam hal ini masyarakat harus terhindar dari doktrin praktisi politik yang menjadikan etnis sebagai basis dalam perebutan kekuasaan sehingga tidak menimbulkan konflik yang akhirnya merugikan masyarakat.

b. Bagi Politisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi politisi dalam melihat perkembangan dinamika politik di desa Siru selama ini. Politisasi

etnis sebagai basis atau instrument dalam perebutan kekuasaan jelas menimbulkan keresahan yang berpuncak pada perpecahan di dalam masyarakat itu sendiri.

c. Bagi Pemerintah Setempat

Menjadi referensi para pemimpin desa Siru untuk tidak terus menerus terjebak pada kepentingan salah satu etnis dominan, tetapi mementingkan seluruh masyarakat tanpa memandang etnis.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti dengan memanfaatkan ruang dialog bersama masyarakat membangun kesadaran dalam mewujudkan demokrasi yang kondusif, serta dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Firmansyah tahun 2009 berjudul “Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi Atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2009), dapat diketahui bahwa dalam demokrasi lokal, terutama pada pemilihan kepala daerah secara langsung telah menunjukkan bahwa peran etnisitas sangat mempengaruhi dan telah menjadi bagian dari politik identitas. Etnisitas juga merupakan satu hal berpengaruh terhadap kandidat dalam menjaring massa untuk memperoleh kekuatan politik melalui dukungan masyarakat. Karena dalam konteks politik identitas, etnis merupakan satu kekuatan yang penting untuk meraih kekuasaan. Oleh karena itu, ini merupakan perilaku politik yang tidak bisa dibendung namun penting untuk di tata, terutama dalam era ‘*ethnic revival*’ (kebangkitan etnis) dan era demokrasi global.

Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh M. Nawawi, Haslinda B. Anriani, dan Ilyastahun 2010 berjudul “Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik pada Pemilukada”, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks pemilukada tahun 2010 memperlihatkan kecenderungan baru dalam kontestasi politik di Poso. Meski persaingan cukup sengit antara empat pasangan calon bupati-wakil bupati, namun isu-isu agama dan etnis nampaknya tidak laku dijual sebagai komoditas kampanye. Muncul isu-isu baru yang memperlihatkan adanya

kejenuhan masyarakat Poso dengan konflik kekerasan yang berkepanjangan dan sekaligus pertimbangan logis mereka terhadap isu-isu yang menonjolkan etnisitas, sehingga jargon keamanan dan ketertiban, kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi lebih diterima sebagai sebuah solusi. Hal ini tidak lepas pula dari komposisi semua pasangan calon yang kelihatannya mengakomodasi konsep *power sharing* sehingga kombinasi Kristen-Islam menjadi pilihan, hal yang sekaligus menggambarkan komposisi penduduk Kabupaten Poso saat ini. Faktanya temuan penelitian memperlihatkan bahwa semua pasangan calon memainkan isu etnis dan agama, meski dalam skala lokalitas/berdasarkan wilayah menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat wilayah tersebut. Kemenangan pasangan calon tertentu dibasis wilayah yang memiliki kesamaan identitas etnik, agama, latar belakang keluarga menjadi buktinya. Juga tampak pula pada beragam simbol-simbol etnis dan agama yang dimanfaatkan oleh pasangan calon sejak masa pencalonan hingga saat pencoblosan dilaksanakan. Kesiapan penyelenggara yang baik pada aspek teknis maupun aspek moralitas dan integritas terutama pada KPU Kabupaten Poso mampu meminimalisir konflik selama proses pilkada. Koordinasi antara pihak KPU, Panwaslukada, Pemerintah Daerah dan aparat keamanan juga memberi andil besar pada pelaksanaan pilkada yang relatif aman di Kabupaten Poso.

2. Peran Politik Identitas

Identitas adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu *idem*, yang artinya adalah sama. Secara filosofis, identitas merupakan konsep yang mempunyai dua pengertian didalamnya yaitu *singleness over time* dan

samenessamid difference (via desantarafoundation.org). Berarti terdapat dua konsep mengenai identitas, yaitu persamaan dan perbedaan. Hal inilah yang biasa disebut dengan konstruksi keakuan (*selfness*) dan yang lain (*the other*). Individu mengidentifikasi diri mereka dan orang lain. Setiap individu berpacu untuk menguatkan identitas yang melekat pada diri mereka. Dari setiap proses identifikasi, maka individu membentuk siapa dirinya. Ketika individu membentuk siapa dirinya (*selfness*), maka secara otomatis ia akan mencari negasinya atau *theother*. Jadi, proses identifikasi *selfness* dan *the other* tersebut dipengaruhi oleh cara individu atau kelompok memandang dirinya dalam lingkungan dan komunitas (Widayanti, 2009: 18).

Berkaitan dengan pembentukan identitas, terdapat tiga perspektif darimana kita melihatnya yaitu *primordialisme*, *konstruktivisme*, dan *instrumentalisme*. Perspektif *primordialisme* adalah perspektif yang menerangkan bahwa identitas terbentuk secara alamiah dan turun-temurun (*given*) sehingga tidak dapat dibantah. Perspektif *primordialisme* melihat etnis dalam kategori sosio-biologis. Pendekatan ini umumnya beranggapan bahwa kelompok-kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran seperti kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa, dan organisasi sosial yang memang disadari secara objektif sebagai hal yang *given* (Putri, 2004 via vegitya.unsri.ac.id)

Selanjutnya adalah perspektif *konstruktivisme*. Dalam perspektif ini identitas dibentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat (Aini dalam Kinasih, 2005: 17). Jadi, identitas terbentuk karena adanya proses sosial yang kompleks. Perspektif yang terakhir adalah *instrumentalisme*. Dalam pandangan ini

identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan. Identitas dipahami sebagai sesuatu yang tidak statis karena selalu ada perubahan dalam relasi antar identitas serta berkembangnya produk wacana politik dari elit yang berkuasa. Instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut-atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras, dan bahasa (Aini dalam Kinasih, 2005: 17).

Identitas bukanlah suatu yang tetap dan alamiah, melainkan sebuah proses yang terus menerus berubah, serta memiliki titik-titik perbedaan yang terus berkembang (Trianton, 2013: 10). Sifat identitas situasional, ia dapat bergeser dan berubah sesuai dengan konteks sosial yang ada (Tirtosudarmo, 2007: 143). Dengan kata lain, identitas tidak statis tetapi dinamis. Identitas semakin lama semakin bergerak, tidak sama persis ketika awal pembentukannya. Identitas yang terus menerus berubah dapat kita lihat dalam kelas, gender, agama, etnis, dll.

Apabila berbicara mengenai identitas bukan hanya berbicara mengenai individu (tunggal) tetapi juga mengenai kelompok dan kolektivitas (jamak). Tidak dipungkiri individu membutuhkan individu lain, membangun relasi, serta berinteraksi satu sama lain. Interaksi-interaksi yang terbangun antar individu inilah yang secara otomatis membentuk kelompok sosial. Saat berinteraksi, antar individu tersebut akan menyadari bahwa terdapat perbedaan dan persamaan terkait dengan kepentingan dan unsur pembentuk konsep diri mereka (Afif, 2012: 18). Proses interaksi di kelompok sosial inilah yang disebut dengan identitas sosial.

Dasar pembentukan identitas sosial ini antara lain ras, etnis, seksualitas (nominal), kelas, dan gender (Widayanti, 2009: 20).

Berkaca dari sifat identitas yang dinamis, politik identitas selalu dikonstruksi dan dipertahankan secara refleksif dengan berdasarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan (Widayanti, 2009: 21). Sehingga disaat identitas bergeser ke arah kepentingan yang berubah, bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politis. Disaat adanya politisasi identitas, identitas itu bergerak kepentingan, identitas yang pada mulanya adalah *base on identity* dan *base on interest* telah dijadikan instrumen untuk mendapatkan simpatidari masyarakat. Jadi dasar terjadinya politik identitas karena adanya suatu kelompok yang memiliki berbagai kepentingan.

Dalam jurnal yang berjudul *Politik Identitas dan Kebangsaan* (via desantarafoundation.org) menyebutkan bahwa politisasi identitas dapat didefinisikan sebagai tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan (via publikasi.umy.ac.id). Politisasi identitas juga kerap disebut sebagai pembentukan bahasa baru identitas dan tindakan untuk mengubah praktik sosial, biasanya melalui pembentukan koalisi dimana paling tidak beberapa nilai dimiliki bersama (Barker, 2004: 416).

Dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik (Kemala, 1989). Simbol-simbol budaya ini dapat

berupa bahasa maupun pakaian yang mencirikan budaya dan etnis tertentu. Identitas dapat dijadikan untuk kepentingan elit dan sarana kekuasaan yang memungkinkan terjadi penguatan politik identitas di satu pihak.

Oleh karena itu, politisasi identitas kerap dikaitkan dengan citra dan wacana yang ditampilkan kepada publik. Wacana merupakan wujud dari praktek-praktek kekuasaan. Wacana menyangkut legitimasi bagi penguasa-penguasa elit dalam arena politik dan kerap dijadikan sebagai alat strategis politik. Hal senada juga dikemukakan oleh Michel Foucault dalam jurnal milik Ibnu Hamad. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bagaimana kekuasaan dapat mengontrol wacana, begitu pun sebaliknya, wacana dapat menghegemoni publik. Wacana disini dapat diartikan sebagai gagasan, konsep, maupun efek. Dari wacana ini kita dapat melihat bahwa realitas dipahami sebagai konstruk yang dibentuk melalui wacana. Konstruksi wacana inilah nantinya akan berdampak pada terbentuknya wacana dominan.

Faktor utama mengapa kandidat menggunakan isu identitas dalam menarik simpati karena adanya faktor sosiologis dari perilaku pemilih yang cenderung memilih kandidat berdasarkan dari etnis yang sama. Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa politisasi identitas dilakukan karena adanya pencarian massa yang dilakukan oleh elite-elite politik. Mereka kerap melakukan pemetaan pemilih berdasarkan perilaku politik pemilih. Hal ini dijelaskan dalam teori milik Daniel N. Posner (2007). Teori ini menjelaskan ada dua kecenderungan elit politik menggunakan isu-isu identitas. Pertama, kandidat-kandidat biasanya menggunakan berbagai pola pendekatan terhadap etnisitas menjelang arena

pemilihan. Target yang menjadi sasaran adalah etnis yang bersangkutan maupun yang berdekatan dengan etnis tersebut. Kedua, kandidat memainkan kartu etnis (*playing ethnic card*) untuk mengamankan batas keunggulan yang dimilikinya dalam sebuah arena kompetisi baik ketika pemilihan berlangsung maupun setelah pemilihan.

Identitas selalu melekat pada setiap individu dan komunitas. Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang. Ada tiga pendekatan pembentukan identitas, yaitu:

- a. Primodialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun.
- b. Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat.
- c. Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan (Widayanti, 2009: 14-15).

3. Konsep Mengenai Etnisitas

a. Hakikat Etnis

Kata etnisitas berarti ciri-ciri yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, terutama ciri-cirinya yang terkait dengan ciri-ciri sosiologis atau antropologis, misalnya ciri-ciri yang tercermin pada adat istiadat yang

dilakoninya, agama yang dianutnya, bahasa yang digunakan, dan asal usul nenek moyangnya. Kelompok etnik ini dapat diidentifikasi dalam lingkungan budaya yang lebih luas melalui berbagai cara, seperti dari riwayat kehadirannya di tengah lingkungan budaya yang lebih luas, dari praktek keagamaan yang dilakukannya, diskriminasi yang diperolehnya dan dari kelompok masyarakat yang lebih besar. Selain itu, anggota kelompok etnik memiliki ciri fisik yang khas (Ramsey, 2003).

Kata *etnis* sering dikacaukan dengan kata *ras* meskipun sudah jelas bahwa kata *ras* mengacu pada ciri-ciri biologis dan genetik yang membedakan seseorang dari orang lain dalam suatu kelompok masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan ciri-ciri ini, ditemukan pada umumnya semua manusia dikelompokkan menjadi tiga jenis *ras*, yaitu *ras Caucasoid*, *Negroid*, dan *mongoloid*. Kekacauan ini terjadi karena, perbedaan yang sering terjadi pada kelompok-kelompok dalam suatu ras yang menyebabkan kelompok ini dipandang sebagai kelompok yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dan diperlakukan secara berbeda oleh anggota kelompok yang lebih besar dalam kelompok ras tersebut (Ramsey, 2003). Artinya, dalam suatu ras tertentu, bisa jadi terdapat beberapa kelompok yang lebih kecil yang dipandang sebagai etnis tersendiri. Oleh karena itu, etnis tidak lagi selalu dilihat dari sudut ras yang dimiliki suatu kelompok etnis. Menurut Ratcliffe (2006) kelompok etnis memiliki kesamaan asal usul dan nenek moyang, memiliki pengalaman atau pengetahuan masa lalu yang sama, mempunyai identitas kelompok yang sama, dan kesamaan

tersebut tercermin dalam lima faktor, yaitu (1) kekerabatan, (2) agama, (3) bahasa, (4) lokasi pemukiman kelompok, dan (5) tampilan fisik.

Darity (2005) mendefinisikan bahwa etnik adalah kelompok yang berbeda dari kelompok yang lain dalam suatu masyarakat dilihat dari aspek budaya. Dengan kata lain, etnik adalah kelompok yang memiliki ciri-ciri budaya yang membedakannya dari kelompok yang lain. Ciri khas budaya yang membedakannya dari kelompok etnis yang lain terlihat dalam aspek: kekhasan sejarah, nenek moyang, bahasa dan simbol-simbol yang lain seperti: pakaian, agama, dan tradisi.

Definisi di atas, pada dasarnya tidak berbeda, namun saling melengkapi. Artinya, definisi tersebut menguraikan konsep *etnis* dengan inti sari penjelasan yang sama, dan perbedaan –perbedaan yang terdapat pada suatu definisi tidak bertentangan dengan definisi lain, melainkan menjadi saling melengkapi. Oleh karena itu, berdasarkan definisi di atas disarikan pengertian *etnis* sebagai berikut: *Etnis* adalah kelompok yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang khas yang membedakannya dari etnis yang lain. Eksistensi kelompok dan kekhasan kelompok disadari oleh setiap anggota etnis. Kekhasan budaya etnis tercermin dalam kolektifitas tindakan, kesamaan agama, kekhasan bahasa, pakaian dan tradisi. Oleh karena kekhasan ini, anggota kelompok memiliki identitas kelompok dan etnisitas ini juga ditandai dengan kesamaan lokasi pemukiman. Kekhasan ini pada dasarnya disebabkan oleh kesamaan atau kemiripan nenek moyang mereka dan asal usulnya dan oleh karenanya

kekhasan kelompok juga ditandai oleh tampilan fisik yang khas dan pengalaman atau pengetahuan bersama terhadap masa lalu yang sama. Banks (2005) menambahkan satu lagi ciri khas yang dimiliki suatu etnis, yaitu sifat psikologis yang khas. Artinya, selain aspek budaya, aspek psikologis suatu etnis bisa menjadi ciri pembeda suatu etnis dari etnis yang lainnya.

Seiring dengan uraian di atas, Asmore (2001) mengatakan bahwa etnisitas menyiratkan kekhasan budaya yang dimiliki suatu etnis yang membedakannya dengan etnis lain. Namun demikian, hubungan antara etnisitas dan kebudayaan sangat kompleks dan oleh karena itu, hubungan keduanya bukanlah hubungan satu lawan satu (*one to onerelationship*) di mana satu kelompok yang memiliki budaya tertentu, otomatis menjadi satu kelompok etnis tertentu. Etnisitas, menurut Asmore (2001) adalah properti hubungan antara dua atau beberapa kelompok. Hubungan tersebut, antara lain, merupakan komunikasi sistematis yang berlangsung secara terus menerus untuk mengkomunikasikan perbedaan budaya oleh kelompok-kelompok yang mengkleim kelompoknya sebagai etnis-etnis yang berbeda. Oleh karena itu Asmore (2001) mengatakan bahwa etnisitas bersifat relational dan situasional di mana karakter etnis terlibat di dalamnya.

b. Potensi Konflik Etnis

Asmore (2001) mendefinisikan konflik sebagai ketidak sesuaian tujuan, keyakinan, sikap dan/atau tingkah laku. Artinya, berdasarkan

keyakinan suatu etnis yang dibangun berdasarkan budaya etnisnya memiliki tujuan etnis secara umum dan tujuan tersebut dicapai dengan rancangan sikap atau tingkah laku anggota etnis. Tujuan ini menjadi cita-cita yang harus dicapai, namun dalam kenyataannya tujuan tersebut tidak tercapai oleh karena berbagai faktor, bahkan bisa jadi budaya yang diyakininya juga terancam juga karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Kesadaran semua anggotanya terhadap suatu kelompok etnis yang berlebihan dapat memicu munculnya faktor etnosentrisme (*ethnocentrism*) yang bisa jadi salah satu faktor pemicu konflik etnis. Etnosentrisme adalah sikap dasar yang menunjukkan keyakinan bahwa kelompok etnisnya merupakan etnis yang paling super dibandingkan dengan etnis lainnya. Etnis lainnya dipandang sebagai etnis yang lebih rendah dari etnisnya. Kebudayaan etnisnya dianggap sebagai kebudayaan yang paling utama atau paling sentral, yang lain adalah budaya pendukung, agamanya dipandang sebagai agama yang paling baik, tradisinya sebagai tradisi yang paling baik, pakaian adatnya dipandang sebagai yang paling baik, dan lain-lain.

Sikap seperti ini, mencerminkan keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok etnisnya yang dapat mengganggu kontak atau keguyuban antar etnik, bahkan dapat menimbulkan diskriminasi, buruksangka, kekerasan dan konflik antar etnis (Darity, 2005).

Faktor-faktor yang dapat memicu konflik antar etnis dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu (1) paradigma kultural dan (2) paradigma struktural (Darity, 2005). Paradigma kultural memandang konflik etnis sebagai isu identitas sosial yang disebabkan oleh adanya ancaman terhadap budaya etnis. Ancaman ini bisa jadi dipicu oleh etnosentrisme sebagaimana diuraikan di atas, diskriminasi, buruk sangka, dll. Paradigma struktural memandang bahwa konflik etnis bukan merupakan isu identitas etnis, melainkan isu yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi, masalah politik, termasuk masalah pemukiman. Konflik antar etnis yang bersifat struktural dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) perebutan sumberdaya yang langka, seperti perebutan kekuasaan, lapangan kerja, teritorial, ekonomi, pengakuan hak dalam artian yang luas, dll. (2) modernisasi yang bertentangan dengan budaya etnis, dan (3) penambahan anggota etnis melalui mekanisme non kekerabatan (*non kinsip*). Selain itu, terdapat faktor pemicu lain, seperti (1) kesamaan budaya suatu etnis yang mengabaikan kesetaraan sosial (*overrulesocial equality*), (2) terpicunya kepahitan dan ketidakadilan masa lalu yang dialami oleh suatu etnis, (3) terpicunya pengalaman pribadi yang buruk dari anggota suatu etnis, dan (4) pertentangan antara anggota pendatang lama dan pendatang baru, dan (5) Terjadinya penyederhanaan kompleksitas sosial menjadi pertentangan sederhana (Ratcliffe, 2006).

Konflik etnis sebagaimana dipaparkan di atas, baik yang bersifat kultural maupun struktural terjadi karena pada dasarnya potensi konflik

telah terdapat di dalam suatu etnis sebagai kelompok dan di dalam diri anggota-anggotanya sebagai individu. Potensi tersebut bersumber dari perbedaan budaya, tradisi, bahasa, kekerabatan, agama, pakaian adat, pengalaman masa lalu, kesamaan nenek moyang dan asal usul. Potensi ini dengan sangat mudah terpicu menjadi konflik jika perbedaan-perbedaan etnis tersebut diarahkan atau dikembangkan oleh pihak lain atau kelompok etnis lainnya menjadi tindakan-tindakan diskriminatif, tindakan buruk sangka, tindakan yang mengusik identitas etnis, dan tindakan yang mengganggu perolehan berbagai sumberdaya yang menjadi tujuan dari suatu etnis.

Potensi konflik etnis cukup besar sebagai akibat dari perbedaan etnis yang sangat beragam. Oleh karena itu, tindakan pihak eksternal etnis, seperti pemerintah, etnis lain atau anggota etnis lain harus menyadari adanya perbedaan tersebut dan menghargainya sebagai penciri eksistensi kelompok etnis tersebut serta menjadikannya sebagai dasar penetapan tindakan yang nyaman bagi eksistensi kelompok etnis. Bahkan keputusan penentuan tindakan-tindakan anggota kelompok pun harus didasarkan pada tindakan yang menjadikan perbedaan etnis tersebut sebagai dasar. Tindakan yang dimaksud mencakup konsep yang luas, tidak terbatas pada tindakan non-verbal, melainkan meliputi tindakan verbal, seperti tindakan berkomunikasi.

4. Gejala Politik Identitas Etnis

Kerusuhan bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) di beberapa daerah di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun yang terakhir menunjukkan dinamika politik lokal semakin memanas. Berbagai isu yang dilontarkan ditengah masyarakat dengan begitu muda menimbulkan gejolak yang cenderung mengarah kepada terjadinya konflik. Ibarat rumput kering yang dengan begitu muda terbakar ketika masyarakat disebarkan isu negatif yang berbau suku, agama dan ras.

Penggunaan etnis sebagai basis perebutan kuasa, sebagai contoh kasus yang sangat mencolok sekali terjadi di berbagai daerah saat ini yang seolah-olah telah memberi warna perbedaan antara etnis, suku, agama dan ras, yang pada hakekatnya itu hanyalah cara-cara para elit politik untuk mempertahankan kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa dalam hal penempatan tataran birokrasi, etnisitas jugamenjadi pertimbangan dalam menentukan seseorang pada posisi jabatan yang sangat strategis seperti bupati, kepala dinas sampai kepala desa.

Fenomena di atas menggambarkan kepada kita bahwa dinamika politik lokal sangatlah dinamis dan apabila diprovokatori oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan politik tertentu sangat berimplikasi kemungkinan terjadinya konflik. Pada masa-masa yang akan datang perlu mengantisipasi terhadap kemungkinan akan tumbuhnya dinamika politik lokal yang sangat tinggi. Hal ini sejalan pula dengan berkembangnya proses demokratisasi di semua tingkatan masyarakat, termasuk ditingkat lokal. Pejabat pemerintah tidak lagi

merupakan individu yang “*untouchable*” namun mereka sangat terbuka untuk dijadikan sasaran kritik dari berbagai pihak di daerah. Oleh karena itu kemungkinan peningkatan terhadap akuntabilitas pejabat di daerah akan sangat tinggi, karena akan terjadi proses skrutisasi terhadap pemegang jabatan, baik yang menyangkut perilakunya sehari-hari, ataupun yang berkaitan dengan pemilihan kebijaksanaannya. Hal itu menjadi kuat lagi sejalan dengan meningkatnya kebebasan, baik kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat.

Terdapat dampak dari keterlibatan peran politik identitas etnis dalam aspek politik pada masyarakat, yaitu terjadinya perpecahan atau disintegrasi. Ketika dalam perebutan kekuasaan dimana jargonnya adalah etnis, maka akan muncul sekte-sekte atau pengelompokan masyarakat berdasarkan etnis masing-masing. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara masing-masing kelompok dan akhirnya terbentuklah etnosentrisme dalam masing-masing kelompok. Kebhinekaan sebagai simbol persatuan tidak lagi dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga potensi terjadinya konflik semakin besar.

Gejala yang sangat menarik saat ini terjadinya konflik dimana-mana akibat keputusan yang diambil oleh para pejabat lokal dipandang menguntungkan golongan dan etnis tertentu, dilain pihak justru mendiskriminasikan etnis minoritas yang menimbulkan ruang konflik baik antara pemerintah dengan masyarakat atau antara etnis tertentu ketika terdapat pendiskriminasian.

5. Aturan dan Konsep Pemilihan Kepala Desa

a. Pengertian Desa

Menurut P.H. Collin (2004:257) desa secara etimologi berasal dari bahasa Sangsekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “ *a group of houses andshops in a country area, smaller than a town.*”

Menurut H.A.W. Wijaya (2008:9) Desa adalah : “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 melalui Pasal 1 mendefinisikan : “Desa atau dengan nama lain, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang dan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihormati dan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan yang ditempati oleh kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yakni :

1. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga.
2. Faktor luas, yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.

3. Faktor letak, yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
4. Faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan , pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa.
5. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat.
6. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

b. Pengertian Kepala Desa

Menurut Sunardjo (2004:197) kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Sedangkan menurut Surbakti (2005:81) kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Lebih lanjut Taliziduhu Ndraha (2001:92) mengatakan bahwa kepala desa merupakan seorang Presiden desa yang memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas serta membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya.

c. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.

Pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan 2, yakni

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Dede Mariana (2008:62) Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah/pernah kawin.

Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
- 2) Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas.
- 3) Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun.
- 4) Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui olehsiapapun dan dengan jalan apapun.

d. Mekanisme Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 15 mengatur tentang mekanisme kampanye calon kepala desa sebagai berikut ; calon kepala desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan. Panitia pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye serta massa kampanye dan melaporkannya kepada BPD. Satu minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara, masing-masing calon kepala desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun. Apabila ada calon kepala desa yang terbukti melakukan kampanye seminggu sebelum pemungutan suara, maka calon kepala desa tersebut dinyatakan gugur oleh panitia pemilihan.

Selanjutnya pasal 16 mengatur tentang tata cara kampanye sebagai berikut : Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum dan selebaran oleh calon yang bersangkutan. Pada saat kampanye dilarang :

1. menjelekkkan maupun menghina calon lain;
2. materi kampanye dilarang mengandung unsur SARA;
3. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
4. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan lain;
5. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain.

e. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pelaksanaan Pemungutan Suara diatur pada Bagian Kedua bab VI sebagai berikut :

Pasal 19 ayat (1) :Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil.

Pasal 19 ayat (2) :Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus hadir untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.

Pasal 20 ayat (1) : Jumlah tempat pemungutan suara dengan ketentuan satu tempat pemungutan suara (TPS) dipergunakan maksimal 300 orang yang memiliki hak pilih disesuaikan dengan jumlah pemilih dan kondisi lingkungan setempat.

Pasal 20 ayat (2):Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

f. Perhitungan Suara

Tata cara perhitungan suara diatur pada BAB VI Bagian Ketiga Pasal 22 sampai dengan pasal 25.

Pasal 22 :Sebelum semua pemilih menggunakan hak pilihnya, panitia meminta kepada masing-masing calon kepala desa yang berhak dipilih menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.Pasal 23 ayat (1) : Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk di hadapan saksi-saksi dan masyarakat. Pasal 23 ayat (2) : Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk dicatat dipapan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.Pasal 24 ayat (1) : Surat suara dianggap tidak sah, apabila :

1. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan.
2. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara.
3. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih.
4. memberikan suara untuk lebih dari satu calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
5. menentukan calon Kepala Desa lain selain calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang telah ditentukan.
6. mencoblos di luar batas tanda gambar yang disediakan.

Pasal 24 ayat (2) : Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada Pemilih sebelum pencoblosan surat suara. Pasal 25 : Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suarar terbanyak.

g. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Penetapan calon kepala desa terpilih diatur pada BAB VI Bagian Keempat Pasal 26-28.

Pasal 26 ayat (1) : Setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, dan membacakan berita acara pemilihan. Ayat (2) : Berita acara pemilihan yang dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan para saksi masing-masing calon kepala desa pada saat itu juga. Ayat (3) : Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) : Ketua panitia pemilihan menyampaikan laporan berita acara pemilihan kepada BPD. Ayat (2) : BPD segera menyampaikan penetapan calon kepala desa terpilih kepada bupati melalui camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 28 : Bupati menerbitkan keputusan bupati tentang pengesahan, pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

h. Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pelantikan kepala desa terpilih diatur pada BAB VI Bagian Kelima Pasal 29 sampai dengan Pasal 31.

Pasal 29 ayat (1) : Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih, Kepala Desa Terpilih segera dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Ayat (2) : Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat. Ayat (3) : Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

i. Penyelesaian Permasalahan Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa

Penyelesaian permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa diatur pada Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Ayat (1) : Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa, permasalahan diselesaikan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Ayat (2) : Laporan dugaan permasalahan atas proses pemilihan kepala desa disampaikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

pelaksanaan pemilihan dengan mencantumkan identitas diri. Ayat (3) : Untuk tingkat Kabupaten laporan dugaan permasalahan proses pemilihan kepala desa ditangani oleh tim pemeriksa kasus pemerintahan desa dan rekomendasi hasil pemeriksaan dipergunakan sebagai dasar untuk proses selanjutnya. Ayat (4) : Apabila terbukti adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa maka pemilihan kepala desa yang sudah dilaksanakan dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang.

Dari konsep pemilihan kepala desa yang telah dipaparkan di atas, secara kontekstual di desa Siru menerapkan konsep yang sama..

6. Landasan Teori Sosiologis

a. Teori Instrumentalis Etnis

Dalam pandangan ini identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan. Identitas dipahami sebagai sesuatu yang tidak statis karena selalu ada perubahan dalam relasi antar identitas serta berkembangnya produk wacana politik dari elit yang berkuasa. Instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut-atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras, dan bahasa (Aini dalam Kinasih, 2005: 17).

Etnisitas merupakan identitas yang berkaitan dengan kebudayaan. Identitas etnis juga dapat menjadi basis bagi suatu kelompok masyarakat ketika menyuarakan tuntutan mereka. Melalui politik identitas, kelompok

identitas akan melakukan upaya untuk mendapatkan pengakuan politik serta upaya afirmasi atas kelompok mereka yang ter subordinasi di masyarakat. Adanya kelompok identitas dominan dan kelompok identitas yang marginal di satu sisi memang sangat mungkin terjadi pada suatu negara multikultur. Selain upaya politik identitas, identitas etnis juga dapat digunakan sebagai instrumen dalam politik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh David Brown bahwa:

“Ethnicity constitutes one of several forms of association through which individuals pursue their interests relating to economic and political advantage. But there is more to ethnicity than this, since it appears to offer intrinsic satisfaction as well as instrumental utility.”

“Etnis merupakan salah satu bentuk asosiasi yang digunakan oleh individu-individu dalam mengejar kepentingan mereka terkait keuntungan ekonomi dan politik. Namun lebih daripada itu, etnisitas menawarkan kepuasan intrinsik dan kegunaan yang penting.”

Dari pemaparan David Brown tersebut, dapat dilihat bahwa etnis dapat dipolitisasi atau dimanfaatkan sebagai instrumen dalam mengejar keuntungan ekonomi dan politik. Pada aspek ini, etnisitas tidak lagi sebagai kelompok etnis berjuang melakukan upaya afirmasi. Namun lebih daripada itu, identitas etnis dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengejar kepentingan politik. Fenomena ini banyak terjadi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini sangat menarik untuk dicermati karena memperlihatkan suatu paradoks demokrasi dimana pada satu sisi kebebasan dan keberagaman semua kelompok harus dijamin, namun di sisi lain ternyata kebebasan dan keberagaman tersebut dapat digunakan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu. Lebih lanjut,

penjelasan mengenai etnis dalam politik pada penelitian ini menggunakan teori elit yang melihat etnisitas sebagai suatu instrumen dan sumber daya politik. Teori elit klasik berangkat dari analisis Mosca, Pareto, dan Michels. Teori ini membahas mengenai peranan elit dalam politik. Pareto mendefinisikan elit sebagai sebuah kelas dari orang-orang yang berada pada puncak tertinggi dari tatanan aktivitas yang mereka lakukan. Elit sendiri kemudian terbagi menjadi elit penguasa (ruling elite) dan elit yang menunggu untuk dapat berkuasa (elites in waiting). Perkembangan teori elit kemudian membuat sudut pandang dalam melihat fenomena kepentingan elit politik semakin berkembang, salah satunya teori elit politik yang berbasiskan etnisitas.

Setidaknya terdapat dua pendekatan dalam melihat fenomena elit politik yang berbasiskan etnisitas, yaitu secara simbolik dan instrumental. Terkait penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan instrumental yang menyatakan bahwa strategi yang dikembangkan oleh elit politik adalah digunakan untuk melakukan mobilisasi massa. Teoritisi yang mengembangkan pendekatan ini antara lain Paul Brass dan David Brown.

Pendekatan instrumental melihat bahwa kebudayaan merupakan instrumen dari tindakan politik. Paul Brass melihat bahwa etnis merupakan sumber daya politik yang kuat untuk meraih dukungan dari masyarakat luas pada saat terjadi kompetisi antar elit politik. Oleh sebab itu, Paul Brass menilai bahwa identitas etnis bukan merupakan sesuatu yang given, melainkan hasil dari konstruksi lingkungan sosial dan politik. Analisis dari

pendekatan ini akan berfokus pada peran dari pemimpin, motif pemegang kekuasaan, hubungan antara peraturan dan orang-orang yang diatur, strategi mobilisasi massa yang digunakan oleh elit politik, serta untuk memahami kasus pertentangan antar kelompok etnis.

Dari pendekatan instrumentalisme tersebut menjelaskan bahwa makna politik etnis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya melakukan politisasi etnis dalam rangka mengejar kepentingan politik. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward Aspinall (2011) yang menjelaskan bahwa politik etnis merupakan upaya untuk melakukan mobilisasi atau menggunakan etnis dengan berdasarkan pada kesadaran akan adanya perbedaan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh kekuasaan negara, mempengaruhi kebijakan pemerintah, maupun mempengaruhi struktur dari institusi Negara.

Di dalam kontestasi pilkades, sangat perlu mengetahui seperti apa orientasi pemilih itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilih. Faktor tersebut adalah orientasi *policy-problem solving* dan orientasi ideologi. Pemilih yang berdasarkan orientasi *policy-problem solving*, memandang bahwa yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana kontestan mampu menawarkan program kerja atau solusi bagi suatu permasalahan yang ada. Pemilih akan cenderung secara objektif memilih kontestan yang memiliki kepekaan terhadap masalah sosial dan kejelasan-kejelasan program kerja. Sedangkan pemilih yang berdasarkan

orientasi ideologi, cenderung mementingkan ikatan ideologi kontestan dengan menekankan aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya, etnis dan agama.

b. Teori Konflik Sosial

1. Definisi Konflik

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak (Wirawan; 2010: 1-2).

Teori konflik yang sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah konflik berdasarkan perbedaan kepentingan. Konflik sangat melekat di masyarakat. Konflik itu sendiri tidak memandang status atau tatanan dalam lingkup sosial Ekonomi sangat memicu terjadinya konflik yang terjadi di dalam masyarakat.

Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam itu terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan

menetap (Dean G. Pruitt, 2004; 27). Ketika terjadi suatu konflik dalam suatu masyarakat proses konsiliasi perlu di pertimbangkan jangan sampai terjadi kekerasan yang dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik.

2. Jenis Konflik

Konflik banyak jenisnya dan dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Sebagai contoh, konflik dapat dikelompokkan berdasarkan latar terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, dan substansi konflik diantaranya adalah konflik personal dan konflik interpersonal, konflik interes (*Conflict of interest*), konflik realitas dan konflik non realitas, konflik destruktif dan konflik konstruktif, dan konflik menurut bidang kehidupan (Wirawan, 2010: 55).

Berbagai macam jenis konflik di atas yang sesuai dengan topik penelitian yang akan diteliti ini adalah konflik menurut bidang kehidupan. Jenis konflik menurut bidang kehidupan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan. Sebagai contoh, konflik sosial sering kali tidak hanya disebabkan oleh perbedaan suku, ras, kelas, atau kelompok sosial, tetapi sering kali disebabkan oleh kecemburuan ekonomi. Konflik ekonomi terjadi karena perbutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Konflik ekonomi misalnya terjadi dalam bentuk sengketa tanah pertanian antara anggota masyarakat dan perusahaan perkebunan, antara anggota masyarakat dan lembaga pemerintahan, atau antara anggota masyarakat lainnya. Konflik ekonomi bisa terjadi antara anggota masyarakat di suatu daerah dan anggota

masyarakat di daerah lainnya mengenai hak wilayah ekonomi (Wirawan;2010:55-69).

Konflik dapat dibedakan berdasarkan posisi pelaku konflik yang berkonflik, yaitu (Wirawan; 2010: 116)

a. Konflik vertikal

Konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat). Elit yang dimaksud adalah aparat militer, pusat pemerintah ataupun kelompok bisnis. Hal yang menonjol dalam konflik vertikal adalah terjadinya kekerasan yang biasa dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat.

b. Konflik horizontal

Konflik terjadi dikalangan massa atau rakyat sendiri, antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Artinya, konflik tersebut terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relative sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan rendah.

3. Faktor Penyebab Konflik

Konflik memiliki sebab yang melatarbelakangi adanya konflik atau pertentangan (Wiese dan Becker, dalam Soekanto, 2006:91):

a) Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka.

b) Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung

pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut.

c) Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan.

d) Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu dapat mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

c. Teori Dominasi Sosial

Teori dominasi sosial, dikemukakan oleh Jim Sidanius dan Felicia Pratto. Pada teori ini dijelaskan bahwasannya manusia mempunyai kecenderungan khusus untuk membuat hierarki atau tingkatan dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang berbeda dalam hierarki tersebut. Hierarki tersebut dapat berdasarkan kelompok sosial atau karakteristik individu. Teori Dominasi Sosial ini menjelaskan bahwa dalam kelompok sosial selalu terbentuk struktur hierarki atau tingkatan sosial. Hal ini menunjukkan terdapat sejumlah kelompok sosial yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu kelompok sosial atau individu yang berada dibagian atas hierarki (dominan) dan juga kelompok sosial atau individu yang berada dibagian bawah hierarki (subordinat). Kelompok sosial atau individu dominan digambarkan dengan nilai-nilai positif yang mereka miliki atau berdasarkan hal-hal

yang bersifat materi atau simbolik. Kelompok atau individu dominan biasanya memiliki kekuasaan politik atau otoritas, memiliki sumber daya yang baik dan banyak, memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi. Hal ini bertolak belakang dengan kelompok sosial atau individu subordinat adalah kelompok atau individu yang memiliki status sosial dan kekuasaan rendah.

Teori dominasi sosial mengidentifikasi beberapa mekanisme hierarki telah dikembangkan dan dipertahankan. Orang dengan dominasi sosial yang tinggi adalah orang yang percaya bahwa kehidupan terbagi ke dalam struktur yaitu yang di atas dan yang di bawah. Mereka yang di atas adalah mereka yang menang, memiliki kekuasaan, atau memiliki seluruh nilai-nilai yang positif. Terbentuknya konstruksi sosial yang membuat suatu kelompok atau individu menonjol dikarenakan suatu karakteristik tertentu, contohnya ras, suku, kelas sosial, agama, dan lain sebagainya. Berdasarkan teori Sidanius dan Pratto, konsep terbesar dari kerangka berpikir orientasi dominasi sosial terdiri atas tiga asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang cenderung disusun berdasarkan kelompok-kelompok hierarki, dimana paling tidak terdapat satu kelompok atau individu yang berada di atas dan satu kelompok atau individu lain yang berada di bawahnya. Asumsi kedua, hierarki atau tingkatan dapat didasarkan pada usia, jenis kelamin, kelas sosial, ras, kebangsaan, agama, dan karakteristik lainnya yang mungkin dapat digunakan sebagai pembeda di antara kelompok atau individu yang

berbeda. Asumsi terakhir, masyarakat secara individu harus menyeimbangkan kekuatan yang ada di dalam dirinya, yaitu diantara satu hierarki kelompok atau individu menuju kelompok hierarki atau individu lain yang memiliki keseimbangan. Teori orientasi dominasi sosial yang dirumuskan oleh Sidanius dan Pratto pada tahun 1991, dirancang untuk menjelaskan sebab akibat dari hierarki sosial serta penindasan. Secara khusus teori dominasi sosial mencoba untuk menjelaskan mengapa masyarakat tampaknya didukung oleh suatu hierarki. Teori dominasi sosial menyebutkan bahwa faktor penting yang mempengaruhi ini adalah perbedaan individu yang dikatakan sebagai Orientasi Dominansi Sosial (ODS) atau sejauh mana individu berkeinginan untuk mendominasi dan menjadi unggul.

d. Teori Solidaritas Politik

Ost (1998) dalam *Solidarity And The Politics Of Anti Politics: Opposition And Reform In Poland Since 1968*, menyebutkan bahwa solidaritas politik merupakan gejala postmodern politik. Gejala ini ditandai dengan akomodirnya kekuatan sosial dalam politik. Ost melihat politik sebagai alat dan tujuan sekaligus. Karena sebagai alat dan tujuan sekaligus maka politik memang harus menyertakan banyak aspek di dalamnya. Banyak aspek itu harus disertakan agar elit politik bisa mendapatkan kekuasaan dalam alam liberalisasi politik.

Gerakan sosialisme semu dianggap mampu mencapai tujuan itu. Dengan demikian warga Siru sebagai konstituen dibuat dan dilakukan

sama seperti logika sosialis. Berikutnya adalah menggunakan semua potensi dalam alam sosialisme itu untuk mencapai tujuan. Maka etnis digunakan untuk tujuan politik. Solidaritas politik diikat dengan tali sosial budaya di ruang sosialisme. Sosialisme semu adalah gejala dimana nilai sosialisme dipakai untuk tujuan politik.

B. Kerangka Konsep

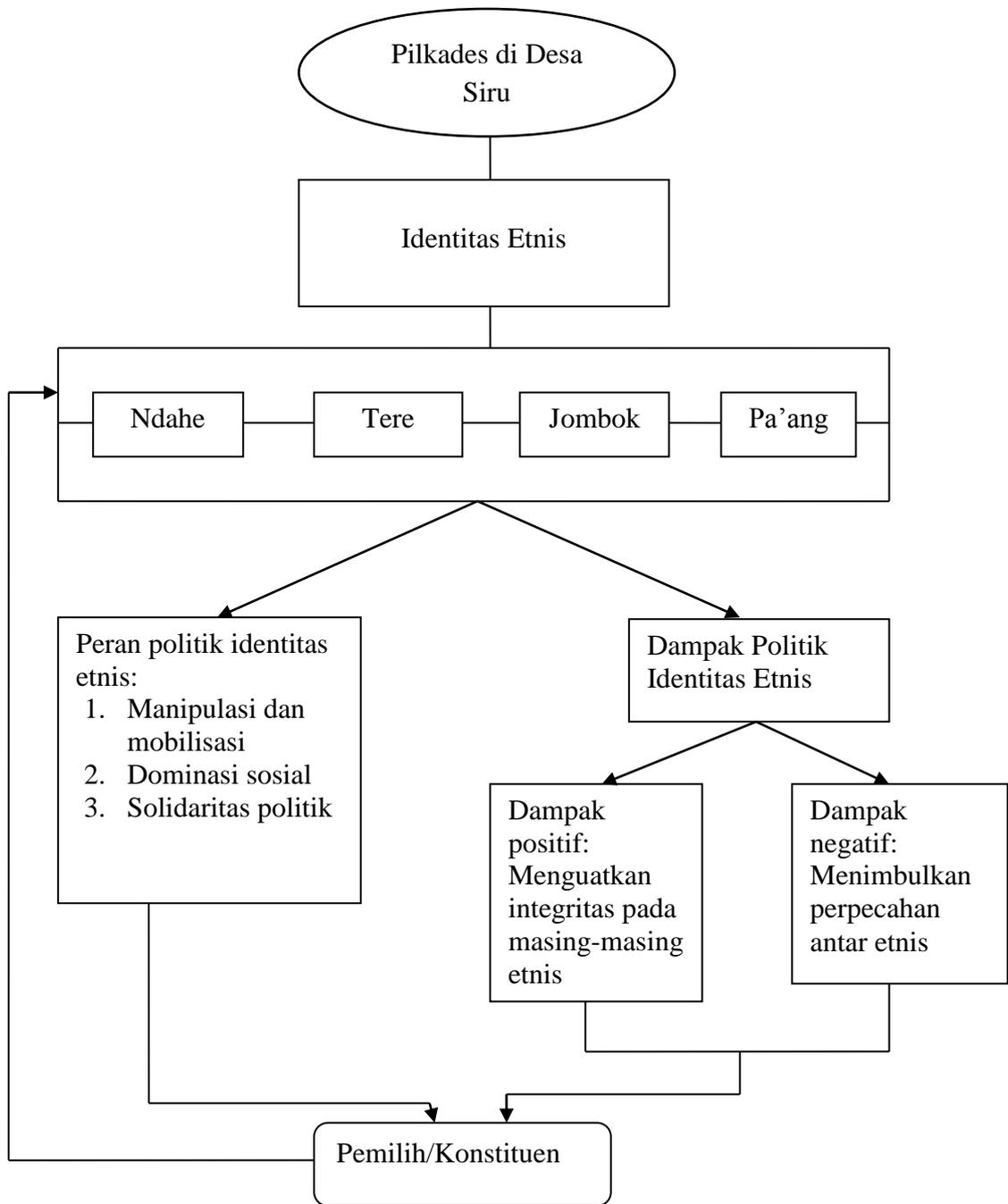
Desa Siru, di dalamnya terdapat keberagaman etnis yaitu Ndahe, Tere, Jombok dan Pa'ang. Ke empat etnis tersebut ditandai dengan perbedaan garis keturunan masing-masing. Sebagai desa yang memiliki keragaman etnis tersebut, pengaruhnya dalam aspek politik sangat besar. Dari berbagai kontestasi pilkades di desa Siru, penulis akan mengumpul data apakah politik identitas etnis menjadi komoditas atau basis dalam perebutan kekuasaan politik di desa tersebut.

Di dalam menganalisis peran politik identitas etnis tersebut, penulis akan mengidentifikasinya melalui pendekatan teori instrumental, dominasi sosial dan solidaritas politik. Teori instrumental dalam konteks politik merupakan suatu identitas yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dalam memobilisasi massa pada aspek politik yang kegiatannya mencakup manipulasi dan mobilisasi. Teori dominasi sosial mengidentifikasi beberapa mekanisme hierarki telah dikembangkan dan dipertahankan. Orang dengan dominasi sosial yang tinggi adalah orang yang percaya bahwa kehidupan terbagi ke dalam struktur yaitu yang di atas dan yang di bawah. Mereka yang di atas adalah mereka yang menang, memiliki kekuasaan, atau memiliki seluruh nilai-nilai yang positif. Terbentuknya konstruksi sosial yang membuat suatu kelompok atau individu menonjol

dikarenakan suatu karakteristik tertentu, contohnya ras, suku, kelas sosial, agama, dan lain sebagainya. Sedangkan solidaritas politik merupakan gejala postmodern politik. Gejala ini ditandai dengan akomodirnya kekuatan sosial dalam politik. Ost melihat politik sebagai alat dan tujuan sekaligus. Karena sebagai alat dan tujuan sekaligus maka politik memang harus menyertakan banyak aspek di dalamnya. Banyak aspek itu harus disertakan agar elit politik bisa mendapatkan kekuasaan dalam alam liberalisasi politik.

Dalam penerapan politik identitas etnis sebagai basis memperoleh kekuasaan, terdapat dampak positif dan negatif. Dampak positifnya menguatkan ikatan atau integritas dalam masing-masing kelompok etnis. Sedangkan dampak negatifnya adalah akan timbul suatu perpecahan antara kelompok masyarakat. Elit politik dalam menggunakan identitas etnis untuk memobilisasi massa, akan tumbuh sekte-sekte dalam masyarakat berdasarkan pengelompokkan etnis masing-masing. Fenomena tersebut cenderung menguatkan sisi etnosentrisme antar etnis sehingga berpotensi menimbulkan konflik.

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Sumaryanto, 2010; 76).

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian kualitatif yang menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam mengenai proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi (Sutopo, 2006: 139). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini kurang lebih 2 bulan, yakni bulan Juni sampai dengan Juli 2018, sedangkan lokasi penelitian terletak di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Informan Penelitian

Merupakan berbagai sumber informasi yang dapat memberikan data yang diperlukan dalam penelitian. Penentuan informan penelitian tentunya harus teliti dan disesuaikan dengan jenis data atau informasi yang ingin didapatkan. Teknik

penentuan informan yang digunakan dapat ditempuh dengan berbagai cara tergantung masalah penelitian yang akan diteliti.

Jadi, berkaitan dengan penelitian ini penulis di dalam menentukan informan penelitian yaitu menggunakan *Purposive sampling*, yaitu penarikan informan yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yaitu sesuai dengan kebutuhan penelitian yang ditetapkan peneliti. Kriteria dalam konteks penelitian ini sampelnya adalah individu-individu yang menurut pertimbangan peneliti memiliki hubungan dengan masalah penelitian sehingga bisa memperoleh informasi yang akurat.

Adapun informan penelitian ini adalah pihak pemerintah Desa Siru, Politisi, Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Masyarakat.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Fokus penelitian dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan peran politik identitas etnis dalam pilkades di desa Siru. Untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi tersebut, peneliti menggunakan pendekatan teori instrument politik yaitu identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan (Widayanti, 2009: 14-15).

2. Mengumpulkan informasi berkaitan dengan dampak politik identitas etnis dalam aspek politik.
 - a. Dampak positif; menguatkan integritas pada masing-masing etnis
 - b. Dampak negatif; mengakibatkan perpecahan antar etnis dalam masyarakat

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan. Yang harus diketahui dalam instrumen penelitian, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Berikut adalah beberapa instrumen dalam penelitian ini:

1. Kamera, yaitu digunakan untuk memotret objek yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.
2. Alat perekam, yaitu digunakan untuk merekam informasi pada saat melakukan wawancara dengan informan penelitian.
3. Lembar observasi, yaitu digunakan untuk mencatat informasi atau data yang diperoleh pada saat wawancara dalam penelitian.
4. Pedoman wawancara, yaitu panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian.

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Umar (2003:56), data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai yaitu pihak pemerintah desa Siru, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda masyarakat

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2005:62), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

2. Data dan Sumber Data

Berikut ini adalah tabel data dan sumber data :

Tabel 1 : Data dan sumber data

	DATA	SUMBER DATA
T1	Untuk mengetahui peran politik	Pemerintah setempat,

	identitas etnis dalam pilkades di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat.	Politisi, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.
T2	Untuk mengetahui dampak politik identitas etnis dalam pilkades di Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat.	Pemerintah setempat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat Tokoh Pemuda dan Masyarakat

G. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu mengumpulkan data di lokasi studi dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan mencatat dokumen dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya (Sutopo, 2006: 66).

Di dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi (Irianti 2003:202) . Berikut ini adalah definisi dari ketiganya :

1. Observasi

Dalam observasi, peneliti akan turun ke lokasi penelitian dengan maksud melihat langsung objek penelitian dan kemudian memperoleh pengetahuan konkret dari sebuah fenomena dalam melakukan suatu penelitian.

2. Wawancara

Pada saat melakukan wawancara, peneliti akan memberi pertanyaan kepada narasumber yang telah ditetapkan dalam penelitian inidengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai fokus dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen. Dalam hal ini dokumentasi berkaitan dengan sumber informasi, baik informan, buku, undang-undang dan sebagainya.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data. Analisis data menurut Nasution adalah “proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori (S. Nasution, 2010:126).

1. Reduksi Data

Data yang peneliti peroleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus menerus bertambah sehingga akan menambah kesulitan bagi peneliti bila tidak segera dianalisis. Oleh sebab itu peneliti mereduksi data dengan menyusun data secara sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan.

Reduksi data yang peneliti lakukan berupa merangkum, dan memilih hal-hal yang penting untuk kemudian disatukan, sebagaimana yang dikatakan Sugiyono “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.”

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan, reduksi data juga dapat pula membantu memberikan kode kepada aspek tertentu.

Reduksi data yang peneliti lakukan adalah dengan memilih dan mengurutkan data berdasarkan banyaknya informan yang menyebutkan masalah tersebut, kemudian peneliti buat dalam sebuah narasi lalu peneliti sederhanakan dengan memilih hal-hal yang sejenis agar mudah dalam menyajikannya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2005:89 mengemukakan bahwa: “Yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif. Penyajian naratif perlu dilengkapi dengan berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semua

itu dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.”

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sedangkan menurut Nasution “mendisplay data bisa dilakukan dengan membuat grafik atau lainnya.

Penyajian data yang peneliti buat berupa teks deskriptif. Penyajian data semacam ini peneliti pilih karena menurut peneliti lebih mudah difahami dan dilakukan. Jika ada beberapa tabel yang peneliti sajikan itu hanya pelengkap saja.

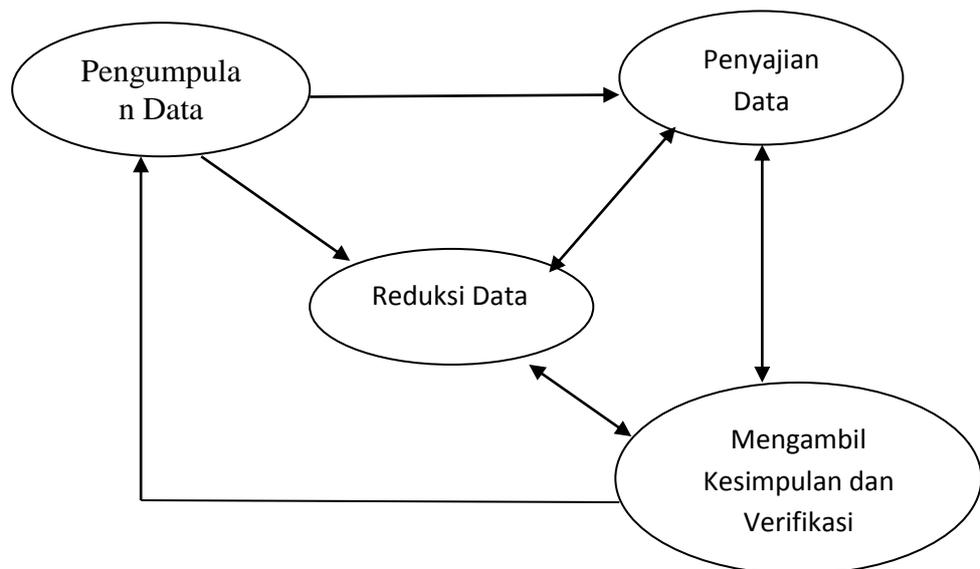
3. Mengambil Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Mengambil kesimpulan lebih baik dilakukan sejak awal penelitian, sebagaimana yang dikatakan Nasution “Sejak semula peneliti berusaha untuk mencari makna yang dikumpulkannya, untuk itu peneliti mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan lain-lain yang pada awalnya bersifat tentatif, kabur dan diragukan.

Logika yang dipergunakan dalam penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat induktif (dari yang khusus kepada yang umum), Faisal mengatakan: Dalam penelitian kualitatif digunakan logika induktif abstraktif.

Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”; bukan dari “umum ke khusus” sebagaimana dalam logika deduktif verifikatif. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data menjadi tak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan atau berlangsung serempak. Prosesnya berbentuk siklus, bukan linier (Sanapiah Faisal, 2003:8-9). Huberman dan Miles melukiskan siklusnya seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2: Siklus Pengumpulan Data dan Analisis Data

I. Teknik Keabsahan Data

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data penelitian kualitatif, yaitu: nilai subyektivitas, metode pengumpulan dan sumber data penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal kualitatif, yaitu: kredibilitas, transferabilitas dan konfirmatas.

1. Kredibilitas

Beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, per debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan member check. Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu: memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

Pengamatan yang terus menerus, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

2. Transferabilitas

yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. *Dependability* yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

3. Konfirmabilitas

yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan

apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.

Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.

BAB IV

DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN DAN DESKRIPSI KHUSUS LATAR PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Manggarai Barat Sebagai Daerah Penelitian

1. Sejarah Singkat Manggarai Barat

Kabupaten Manggarai Barat adalah suatu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten Manggarai Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 2003. Wilayahnya meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, diantaranya adalah Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Seraya Besar, Pulau Seraya Kecil, Pulau Bidadari dan Pulau Longos. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 9.450 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.947,50 km² dan wilayah lautan 7.052,97 km².

Ide pemekaran wilayah Kabupaten Manggarai Barat sudah ada sejak tahun 1950-an. Ide ini dimunculkan pertama kali oleh Bapak Lambertus Kape, tokoh Manggarai asal Kempo Kecamatan Sano Nggoang yang pernah duduk sebagai anggota Konstituante di Jakarta. Pada tahun 1963 aspirasi untuk memekarkan Kabupaten Manggarai dengan membentuk Kabupaten Manggarai Barat mulai diperjuangkan secara formal melalui lembaga politik partai Katolik Subkomisariat Manggarai. Pada tahun 1982 Manggarai Barat diberikan status Wilayah Kerja Pembantu Bupati Manggarai Bagian Barat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26-1355 tanggal 11 november 1982.

Melalui proses pengkajian yang matang dengan memperhatikan potensi dan luas wilayah serta kebutuhan untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat maka melalui Sidang Paripurna DPR RI tanggal 27 Januari 2003 aspirasi dan keinginan masyarakat Manggarai Barat mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat maka Kabupaten Manggarai Barat resmi terbentuk.

Pada tanggal 1 September 2003, Drs. Fidelis Pranda dilantik menjadi Pejabat Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang bertugas menjalankan pemerintahan serta mempersiapkan pemilihan kepala daerah definitif . Dan selanjutnya melalui proses demokrasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung Drs. Fidelis Pranda dan Drs. Agustinus Ch. Dula kemudian diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang pertama. Kemudian pada tahun 2010, dilangsungkan proses pilkada yang kedua. Dari proses ini Drs. Agustinus Ch. Dula dan Drs. Maximus Gasa menjadi Bupati dan wakil Bupati yang kedua. Pada awal berdirinya terbagi atas 7 kecamatan yaitu Kecamatan Komodo, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Boleng, Kecamatan Lembor, Kecamatan Welak, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Macang Pacar dan pada tahun 2011 dimekarkan menjadi 10 kecamatan dengan tambahan wilayah pemekaran yakni Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Mbeliling dan Kecamatan Ndosu.

Pada tahun 2015, dilangsungkan proses pilkada yang ketiga. Dari proses ini Drs. Agustinus CH. Dula dan Drh. Maria Geong, Ph.D menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang ketiga. Pada Tahun 2017 jumlah kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat bertambah menjadi 12 kecamatan. Kecamatan baru hasil

pemerkarannya yang ditetapkan melalui Perda No.14 dan No-15 Tahun 2017 adalah Kecamatan Pacar dan Kecamatan Kuwus Barat.

2. Kondisi Geografis dan Iklim

Kabupaten Manggarai Barat merupakan kabupaten yang terletak di wilayah bagian barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Barat berbatasan secara langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipisahkan oleh selat Sape. Kabupaten Manggarai Barat terletak di antara 080 14' – 090 00' Lintang Selatan (LS) dan 1190 21'–1200 20' Bujur Timur (BT). Berikut ini adalah batas-batas wilayah kabupaten Manggarai Barat:

- a. Bagian utara berbatasan dengan laut Flores,
- b. Bagian selatan dengan laut Sawu,
- c. bagian barat dengan selat Sape, dan
- d. bagian timur dengan kabupaten Manggarai.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas daratan mencapai 2.947,50 km², yang terdiri dari daratan Flores dan pulau-pulau besar seperti pulau Komodo, Rinca, Longos, serta beberapa pulau kecil lainnya. Wilayah administrasi kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 Kecamatan yakni kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, Welak, Lembor Selatan, Kuwus, Ndosso, Macang Pacar, Kuwus Barat, dan Pacar.

Sedangkan iklim kabupaten Manggarai Barat beriklim tropis. Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Kabupaten Manggarai Barat dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air

sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin berasal dari Asia dan Samudera Pasifik yang menyebabkan terjadinya musim hujan.

Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Walaupun demikian, mengingat Manggarai Barat dan NTT umumnya dekat dengan Australia arus angin mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah Manggarai Barat kandungan airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Manggarai Barat lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan Manggarai Barat sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari sampai dengan Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif kering. Besarnya curah hujan tahunan rata-rata sekitar 1500 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terdapat di pegunungan yang mempunyai ketinggian 1000 m di atas permukaan laut, sedangkan curah hujan pada daerah-daerah lainnya relatif rendah. Secara umum iklimnya bertipe tropis kering/semi arid dengan curah hujan yang tidak merata.

3. Topografi, Geologi dan Hidrologi

Keadaan topografi, geologi dan hidrologi Kabupaten Manggarai Barat bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Ketinggian wilayah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan ketinggian yang bervariasi yakni kelas ketinggian kurang dari 100 m dpl sebanyak 23 %, 100 – 500 m dpl sebanyak 47 %, 500 – 1000 m dpl sebanyak 25 % dan

lebih dari 100 m dpl sebanyak 3 %. Lebih dari 75 % ketinggian di atas 100 m dpl, kemiringan lerengnya bervariasi antara 0-2 %, 2-15 %, 15-40 % dan di atas 40 %. Namun secara umum wilayah Kabupaten Manggarai Barat, berbukit-bukit hingga pegunungan.

4. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan data agregat kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017 adalah sebanyak 256.491 jiwa, yang terdiri dari 128.932 laki-laki dan 127.559 perempuan. Rasio jenis kelamin 101 yang berarti dari 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

Tabel II: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio Tahun 2017

NO	KECAMATAN	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		Σ	Sex Rasio
		Σ	%	Σ	%		
1	Macang Pacar	15.987	12,4	15.930	12,5	31.917	100
2	Kuwus	12.663	9,8	12.712	10,0	25.375	100
3	Lembor	17104	13,3	17171	13,5	34.275	100
4	Sano Nggoang	7.425	5,8	7.358	5,8	14.783	101
5	Komodo	25.894	20,1	25.170	19,7	51.064	103
6	Boleng	9.758	7,6	9.517	7,5	19.275	103

7	Welak	10.885	8,4	10.589	8,3	21.474	103
8	Ndoso	10.252	8,0	10.231	8,0	20.483	100
9	Lembor Selatan	12.300	9,5	12.129	9,5	24.429	101
10	Mbeliling	6.664	5,2	6.752	5,3	13.416	99
Total		128.932	100	127.559	100	256.491	101

Tabel III: Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur

Umur	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		Sex Rasio
	Σ	%	Σ	%	
00-04	8.672	6,7	8.161	6,4	106
05-09	14.051	10,9	13.694	10,7	103
10-14	17.363	13,5	16.893	13,2	103
15-19	15.832	12,3	15.093	11,8	105
20-24	12.489	9,7	12.841	10,1	97
25-29	10.074	7,8	10.592	8,3	95
30-34	9.747	7,6	10.309	8,1	95
35-39	8.514	6,6	8.735	6,8	97

40-44	7.328	5,7	7.746	6,1	95
45-49	6896	5,3	7.107	5,6	97
50-54	5.760	4,5	5.493	4,3	105
55-59	4.259	3,3	4.113	3,2	104
60-64	2.935	2,3	2.507	2,0	117
65-69	2.084	1,6	1.955	1,5	107
70-74	1.458	1,1	1.248	1,0	117
≥75	1.470	1,1	1.072	0,8	137
Total	128.932	100	127.559	100	101

Tabel IV: Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin

AGAMA	LAKI – LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Islam	25.843	20,0	25348	19,9	51.191	20,0
Kristen	792	0,6	721	0,6	1.513	0,6
Katolik	102.171	9,2	101362	79,5	203.533	79,4
Hindu	114	0,1	114	0,1	228	0,1

Budha	9	0,0	11	0,0	20	0,0
Khonghucu	2	0,0	1	0,0	3	0,0
Lainnya	1	0,0	2	0,0	3	0,0
Total	128.932	100	127.559	100	256.491	100

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel V Migrasi Masuk Penduduk Per Kecamatan Semester 1 (Januari - Juni)
2017

NO	KECAMATAN	Migrasi Masuk Tengah Tahun 2017
1	Macang Pacar	25
2	Kuwus	42
3	Lembor	62
4	Sano Nggoang	19
5	Komodo	290
6	Boleng	19
7	Welak	21
8	Ndoso	35
9	Lembor Selatan	28

10	Mbeliling	21
Total		562

Tabel VI: Migrasi Keluar Penduduk Per Kecamatan Semester 1 (Januari - Juni) 2017

NO	KECAMATAN	Migrasi Keluar Tengah Tahun 2017
1	Macang Pacar	51
2	Kuwus	74
3	Lembor	85
4	Sano Nggoang	17
5	Komodo	194
6	Boleng	23
7	Welak	38
8	Ndoso	54
9	Lembor Selatan	31
10	Mbeliling	17
Total		58

(Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Manggarai Barat 2017)

B. Deskripsi Khusus Desa Siru Sebagai Latar Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Siru

Desa Siru merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Kelurahan Tangge merupakan kelurahan induk yang kemudian terjadi pemekaran sehingga membentuk suatu desa yang dinamakan desa Siru. Semenjak setelah terbentuknya desa Siru, Ali Mustaram yang merupakan salah satu penduduk desa Siru diangkat menjadi pejabat sementara sebagai kepala desa. Seperti aturan umumnya, setelah pemekaran, langkah kemudian adalah penunjukkan orang yang dipercaya untuk menduduki jabatan sementara sebagai kepala desa Siru dalam hal ini adalah Ali Mustaram. Jangka waktu dalam posisi atau jabatan tersebut adalah selama 6 tahun, kemudian setelahnya dilaksanakan kontestasi pilkades sebagai pesta demokrasi yang dimana prosesnya masyarakat desa Siru yang terdaftar sebagai pemilih tetap di DPT berhak menentukan pilihannya pada saat pilkades berlangsung. Terhitung semenjak desa Siru terbentuk, desa Siru sudah melakukan kontestasi 4 kali.

Secara geografis, desa Siru yang memiliki jarak dari ibu kota Kabupaten \pm 58 km, dan jarak tempuh $\frac{2}{5}$ jam. Sedangkan jarak ke ibu kota kecamatan 4,8 km dan lama jarak tempuh $\frac{1}{4}$ jam. Secara administrasi Desa Siru berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Golo Ronggot Kecamatan Welak
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Poco Rutang Kecamatan Lembor
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Lurah Tangge Kecamatan Lembor
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wae wako Kecamatan Lembor

Keadaan umum iklim yang ada di Desa Siru yaitu dengan curah hujannya pertahun 280⁰C. Sedangkan ketinggiannya \pm 3000 meter dari permukaan laut (dpl) dengan suhu udara 20-40 ⁰C. Adapun jumlah curah hujan 3-4 bulan. Sedangkan jenis warna tanah yang ada di Desa Siru adalah merah/kuning/hitam/abu-abu dan tekstur tanahnya adalah Lampungian/ Pasir/ Debu.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat urgen dalam hidup, keberadaan pendidikan merupakan ruang ilmiah dimana berlangsungnya suatu proses transformasi ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik terhadap siswa. Pendidikan kita ketahui bersama adalah memiliki jenjang atau tingkatan yang berbeda yaitu, TK/PAUD, SD/MI, SMP/MA dan perguruan tinggi. Pendidikan sangat menentukan kehidupan seseorang, dengan pendalaman ilmu bisa menjadi modal untuk dikembangkan dalam kehidupan. Berkaitan dengan tingkat pendidikan di desa Siru tahun 2017, berikut ini adalah datanya :

Tabel VII: Tingkat pendidikan di desa Siru

No	Tingkat Pendidikan	L	P
1	Usia 7 – 18 Tahun yg Tidak Pernah Sekolah	150	183
2	Usia 18 – 56 Tahun Keatas yg Tidak Pernah Sekolah	235	265
3	Usia 18 – 56 Tahun yg Tidak tamat SD	50	50

4	Tamat SD / Sederajat	385	427
5	SMP SLTP / Sederajat	185	427
6	Tamat SLTA / Sederajat	156	146
7	Tamat D-1 / Sederajat	-	-
8	Tamat D-2 / Sederajat	3	4
9	Tamat D-3 / Sederajat	3	6
10	Tamat S-1	62	45
11	Tamat S2	2	-
Jumlah		1231	1553

Sumber : Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siru

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aspek yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi manusia. Mata pencaharian di berbagai daerah tidak semuanya sama, itu sangat tergantung pada kondisi geografi dan topografi. Di desa Siru, seperti yang dipaparkan diatas memiliki mata pencaharian yang variatif. Berikut ini adalah data terkait mata pencaharian masyarakat desa Siru tahun 2017:

Table VIII: Mata pencaharian masyarakat desa Siru

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan

1	Petani/peternak	340 org	442 org
2	Pegawai Negeri Sipil	22 org	4 org
3	Nelayan	-	-
4	Pengusaha Kios	28 org	11 org
5	Guru Swasta / Honor	8 org	24 org
7	Dukun Kampung Terlatih	-	2 org
8	Pensiunan PNS / TNI / POLRI	2 org	-
9	Pengusaha Jasa Transportasi	8 Orang	-
10	Bidan / Perawat	3 org	8 org

Sumber : Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siru

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Desa Siru memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut adalah terdiri dari pertanian dan perkebunan. Sehingga tidak heran jika masyarakat di desa Siru lebih banyak bekerja sebagai petani dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Berikut ini adalah tabel pemilikan lahan pertanian tanaman pangan tahun 2017:

Table IX: Pemilikan lahan pertanian tanaman pangan desa Siru

Jumlah keluarga memiliki lahan pertanian	471 keluarga
Tidak memiliki	40 keluarga
Memiliki kurang 1 ha	27 keluarga
Memiliki 1,0 - 5,0 ha	400 keluarga
Memiliki 5,0 – 10 ha	30 keluarga
Memiliki lebih dari 10 ha	14 keluarga
Jumlah total keluarga petani	511 keluarga

Sumber : Kepala Seksi Pemerintahan Desa Siru

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk desa Siru memiliki lahan pertanian yaitu dengan luas yang variatif masing-masing individu. Lahan pertanian tersebut dimanfaatkan oleh para petani untuk ditanami bahan pangan seperti jagung, kacang keledai, kacang tanah, kacang panjang, padi sawah,

padi ladang, ubi kayu, ubi jalar, cabe, bawang merah, bawang putih, tomat, sawi dan beberapa bahan pangan lainnya.

Selain potensi sumber daya alam pada lahan pertanian, di desa tersebut juga terdapat lahan perkebunan. Berikut ini tabel kepemilikan lahan perkebunan tahun 2017:

Table X: Kepemilikan lahan perkebunan desa Siru

Jumlah keluarga memiliki lahan	315 keluarga
Tidak memiliki	196 keluarga

Dari tabel tersebut, bisa diperoleh suatu kesimpulan bahwa secara kuantitas terdapat cukup banyak warga yang memiliki lahan perkebunan. Lahan perkebunan tersebut, komoditasnya adalah seperti kelapa, jambu mete dan kemiri. Dari hasil pertanian dan perkebunan tersebut diatas, masyarakat desa Siru memasarkannya di pasar tradisional Wae Nakeng. Bahan pangan dan hasil perkebunan yang dijual oleh para petani di desa tersebut dinilai cukup mensejahterakan kehidupan mereka sehingga bisa melangsungkan kehidupan.

5. Kehidupan Keberagamaan

Agama merupakan suatu sistem ajaran dari Tuhan yang menyangkut anjuran dan larangan. Indonesia merupakan tergolong Negara yang menganut banyak agama seperti Islam, Kristen, Budha, Hindu dan beberapa agama lainnya. Agama tersebut tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jika melihat kuantitas penganut agama dalam tiap-tiap agama di

berbagai daerah diperoleh dua hal ada penganut minoritas dengan minoritas. Contoh adalah pulau Jawa, dimana islam menjadi agama yang banyak penganutnya sedangkan NTT agama Kristen memiliki penganut yang banyak dari keseluruhan populasi penduduk di daerah tersebut. Realitas tersebut dalam pengkajian akademisi-akademisi maupun referensi dari buku-buku yang menyoroti kehidupan keberagaman di Indonesia, salah satu hal pokok di dalamnya adalah menyangkut toleransi dalam kehidupan keberagaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa, konflik agama di beberapa Negara menunjukkan suatu situasi bahwa agama berpotensi konflik yang tentu saja disebabkan oleh faktor-faktor tertentu

Di desa Siru yang merupakan lokasi penelitian ini, kehidupan keberagamaannya berjalan dengan damai. Dalam sejarahnya sampai sekarang belum ada satu konflik yang berkaitan dengan agama. Di desa Siru, hanya terdapat dua penganut agama yaitu Islam dan Kristen. Penganut dari kedua agama tersebut hidup berdampingan dan menjunjung tinggi nilai toleransi.

6. Awal Mula Pelaksanaan Pilkades di Desa Siru

Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa desa Siru merupakan hasil pemekaran dari kelurahan Tangge. Pilkades pertama kali berlangsung di desa Siru adalah pada tahun 1997. Terhitung dari tahun 1997 hingga 2018, penyelenggaraan pilkades di desa Siru sudah dilakukan 4 kali. Pada pelaksanaan pilkades pertama, Ali Mustaram sebelumnya merupakan penjabat sementara yang ditunjuk setelah pemekaran berhasil menduduki jabatan kepala desa melalui pemilu pada tahun 1997. Sementara pada periode kedua, penyelenggaraan pilkades berlangsung

sengit seperti periode pertama dengan keikutsertaan 4 etnis dalam mengusung calon kepala desa. Hasilnya adalah etnis Ndahe kembali menang yaitu nama Muhamad Amin unggul dalam perhitungan suara. Pada periode ketiga etnis Tere akhirnya menduduki jabatan kepala desa Siru, sedangkan dua etnis lainnya seperti Jombok dan Pa'ang pada saat itu tidak ada keterwakilan yang mencalonkan diri. Pada pelaksanaan pilkades periode keempat, etnis Ndahe yang kembali mengusung nama Ali Mustaram kembali unggul dalam perhitungan suara dan menjabat sampai pada tahun 2017.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Siru kecamatan Lembor kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif yang memberikan gambaran dan informasi mengenai peran politik identitas etnis dalam pilkades di desa Siru.

Pada BAB ini peneliti akan menyajikan data-data hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu di desa Siru dengan melibatkan beberapa informan yakni kepala desa, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Informan tersebut yang memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian ini yaitu baik yang berkaitan dengan seperti apa peran politik identitas etnis dalam pilkades dan bagaimana dampak dari peran politik identitas etnis dalam pilkades di desa Siru.

1. Peran Politik Identitas Etnis dalam Pilkades di Desa Siru

Mengutip Abdillah (2002) “Politik identitas merupakan politik yang fokus kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme. Desa Siru tergolong desa yang majemuk, kemajemukan itu salah satunya ditandai dengan adanya empat etnis yang berbeda yaitu Ndahe, Tere, Jombok dan Pa’ang. Maka menarik kemudian dalam karya ilmiah ini, peneliti ingin mengumpulkan suatu informasi terkait peran politik identitas etnis dalam kontestasi politik lokal di desa Siru.

Dalam rangkaian proses penelitian ini dimana salah satunya adalah kegiatan observasi lapangan dengan didasarkan pada pengamatan, maka diperoleh suatu gambaran bahwa ke empat etnis yang terdapat di desa Siru terlibat dalam suatu agenda politik pilkades. Keterlibatan itu selain ditunjukkan dalam partisipasi pencalonan diri maupun partisipasi dalam pemilihan bagi individu-individu yang memiliki hak memilih. Menurut data observasi yang dilakukan, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Etnis Ndahe tergolong etnis yang secara kuantitas penduduknya lebih banyak dibandingkan etnis lainnya. Dalam setiap periode kontestasi politik pilkdes, keterwakilan etnis Ndahe lebih mendominasi dalam menduduki jabatan kepala desa Siru” (Hasil pengamatan, 22 Juni 2018).

Dari hasil pengamatan tersebut secara jumlah etnis Ndahe mendominasi dan dalam agenda politik seperti penyelenggaraan kontestasi pilkades etnis tersebut unggul. Identitas memungkinkan mengambil suatu peran penting di dalam kesuksesan mencapai kekuasaan tersebut. Mengutip Faktor utama mengapa kandidat menggunakan isu identitas dalam menarik simpati karena adanya faktor sosiologis dari perilaku pemilih yang cenderung memilih kandidat berdasarkan dari etnis yang sama.

Sementara hal lain, etnis Ndahe selain unggul secara kuantitas penduduknya dalam hal strategi kemenangan diterapkan suatu sistem yang tergolong sistemik dan terorganisir. Berikut ini adalah hasil pengamatan strategi dalam memenangkan kontestasi pilkades khususnya etnis Ndahe:

“Suatu sistem kekeluargaan dalam etnis Ndahe yang kuat, hal ini dimanfaatkan oleh kontestan dengan menyatukan kekuatan dalam etnis sebagai basis. Di dalamnya adalah menyangkut hal komitmen untuk memilih kontestan berdasarkan etnisitas” (Hasil pengamatan, 22 Juni 2018).

Dari pengamatan diatas dapat dikatakan bahwa politisasi identitas dilakukan karena adanya pencarian massa yang dilakukan oleh elit-elit politik. Mereka kerap melakukan pemetaan pemilih berdasarkan perilaku politik pemilih. Hal ini dijelaskan dalam teori milik Daniel N. Posner (2007). Teori ini menjelaskan ada dua kecenderungan elit politik menggunakan isu-isu identitas. Kandidat-kandidat biasanya menggunakan berbagai pola pendekatan terhadap etnisitas menjelang arena pemilihan. Target yang menjadi sasaran adalah etnis yang bersangkutan maupun yang berdekatan dengan etnis tersebut.

Konfigurasi antara kuantitas penduduk yang mendominasi dengan strategi yang sangat apik adalah kombinasi yang terukur dan berhasil terkhusus etnis Ndahe. Dalam pengamatan penulis, hal seperti ini kerap dilakukan dan sudah turun temurun dan sulit ditinggalkan karena menyangkut peluang kemenangan.

Sementara itu, dari hasil observasi lapangan berkaitan dengan peran politik identitas dalam etnis Tere, Jombok dan Pa'ang memiliki catatan sejarah yang sama. Sebagai etnis-etnis minoritas meskipun menerapkan suatu strategi kemenangan seperti yang digunakan oleh etnis Ndahe, hal itu tidak bisa mencapai kesuksesan dalam perebutan kekuasaan.

“Etnis Tere, Jombok dan Pa'ang sulit menduduki jabatan kepala desa karena suatu kenyataan bahwa ketiga etnis ini merupakan minoritas” (Hasil pengamatan, 22 Juni 2018).

Tidak bisa disangkal bahwa, politik identitas di beberapa daerah kerap menjadi alat politik untuk menjaring massa. Pada masyarakat pedesaan yang solidaritas kekeluargaannya kuat, memiliki suatu kecenderungan memilih

berdasarkan etnisitas. Oleh elit-elit politik yang haus kekuasaan memilih memanfaatkan hal tersebut sebagai basis kekuatan.

Dalam suatu kesempatan, peneliti mewawancarai salah seorang Tokoh Adat desa Siru yaitu Bapak AA (72 Tahun) dan berikut kutipan wawancaranya:

“Peran etnis bisa dikatakan berpengaruh dalam pilkades di desa Siru, apalagi pada masyarakat pedesaan ikatan primordialnya sangat tinggi” (Hasil wawancara, 22 Juni 2018).

Dari kutipan wawancara diatas, narasumber menguatkan argumennya yang mengatakan peran etnis dalam pilkades memiliki pengaruh dengan mengaitkan primordialisme. Primordialisme kita ketahui bersama bahwa merupakan suatu ikatan yang terbentuk secara alamiah dalam suatu kelompok atau etnis. Ikatan primordialisme tersebut kemudian hadir sebagai suatu orientasi pemilih dalam memilih calon pada pilkades. Untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait peran politik identitas etnis di desa tersebut, peneliti juga mewawancarai salah seorang masyarakat yang Bapak ZF (29 Tahun) dan berikut kutipan wawancaranya:

“Politik identitas sangat jelas memiliki peranan penting dalam strategi memenangkan calon. Di desa Siru khususnya, masing-masing calon melakukan pendekatan dengan kelompok etnisnya yang tujuannya adalah mengumpulkan kekuatan atau menguatkan basis dalam memenangkan pilkades” (Hasil wawancara, 22 Juni 2018).

Berikut ini juga pernyataan yang disampaikan oleh Tokoh Adat desa Siru AA (72 Tahun) terkait peran politik identitas etnis pada saat pilkades:

“Seperti biasanya kontestan dalam pilkades melakukan pendekatan dengan sesama etnisnya. Tujuannya adalah untuk mendapat dukungan. Dalam pertemuan tersebut sangat kuat nilai budaya di dalamnya yakni dengan dirangkaikan do’a” (Hasil wawancara, 22 Juni 2018).

Dari kutipan wawancara tersebut, bahwa politik identitas ikut mewarnai kontestasi pilkades di desa Siru. Pada saat kampanye, calon dari masing-masing etnis menguatkan basis dengan kelompoknya. Menurut hemat penulis, hal tersebut sangat situasional dengan melihat realitas masyarakat yang memiliki struktur etnisitas. Upaya mobilisasi massa dalam kasus ini merupakan tergolong politisasi SARA. Sementara jika mengacu pada hukum Undang-Undang positif, pada pasal 16 mengatur tentang mekanisme kampanye calon kepala desa yang diantaranya adalah: materi kampanye dilarang mengandung isu SARA.

Berkaitan dengan peran politik identitas etnis di desa Siru, peneliti mewawancarai salah seorang masyarakat desa Siru yaitu Ibu SS (55 Tahun) yang memiliki hak suara dalam penyelenggaraan pilkades di desa tersebut dan berikut ini adalah pernyataannya:

“saya kalau ditanya pilih siapa saat pilkades, saya jawab pasti saya akan memilih orang terdekat secara etnis” (Hasil wawancara, 23 Juni 2018).

Berikut ini juga pernyataan Bapak AM (58 Tahun) terkait preferensi memilihnya pada saat pilkades:

“Secara pribadi saya akan memilih sesuai dengan etnis saya. Komitmen yang sudah dibentuk dalam pertemuan tersebut adalah menjadi landasan kuat siapa yang saya dan kami pada umumnya dalam pemilihan” (Hasil wawancara, 23 Juni 2018).

Dalam kutipan wawancara di atas, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu dewasa ini, khususnya pada politik lokal di desa Siru terdapat satu dari tiga hal pelanggaran yang sering terjadi khususnya pada saat kampanye yaitu

politisasi SARA. Pernyataan informan tersebut menjadi satu bukti pengaruh dari peran politik identitas etnis. Politik uang, politisasi SARA dan HOAX, ketiga hal tersebut adalah upaya yang mencederai keberlangsungan demokrasi yang notabeneanya adalah negara ini masih dalam suatu masa transisi dari otoritarianisme menuju sistem yang demokratis. Bapak AM (58 Tahun) dalam suatu kesempatan wawancara menyatakan :

“Politik identitas tidak bisa dihindari dalam masyarakat khususnya di desa Siru, karena ini sudah menjadi hal yang turun temurun. Makanya tidak heran dalam memilih pemimpin acap kali didasarkan pada identitas” (Hasil wawancara, 23 Juni 2018).

Seperti yang dibahasakan pada latar belakang penelitian, dari keempat etnis di desa Siru terdapat salah satu etnis yaitu etnis Ndahe yang secara kuantitas penduduknya terbanyak. Dalam suatu wawancara, Bapak AE (50 Tahun) memberikan informasi sebagai berikut:

“Etnis Ndahe memang merupakan etnis terbesar di desa Siru, ia mendominasi etnis lainnya. Untuk jabatan kepala desa Siru, perwakilan etnis Ndahe seingkali memenangkan pilkades” (Hasil wawancara, 23 Juni 2018).

Dari kutipan wawancara tersebut, semakin menguatkan bahwa salah satu hal yang melatarbelakangi kemenangan calon kepala desa dari etnis Ndahe adalah faktor jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan etnis lainnya. Pernyataan ini didukung oleh informasi diatas sebelumnya yang menegaskan bahwa dalam matari kampanye masing-masing etnis menggunakan politisasi SARA dalam hal ini politisasi etnis. Berkaca dari sifat identitas yang dinamis, politik identitas selalu dikonstruksi dan dipertahankan secara refleksif dengan berdasarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan (Widayanti, 2009: 21).

Sehingga disaat identitas bergeser ke arah kepentingan yang berubah, bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politis.

Mengutip (Widayanti, 2009 : 20) disaat adanya politisasi identitas, identitas itu bergerak kepentingan. Identitas yang pada mulanya adalah *base onidentity* dan *on interest* telah dijadikan instrumen untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Salah seorang tokoh pemuda desa Siru yaitu RT (25 Tahun) dalam suatu kesempatan wawancara, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Hal ini sudah menjadi sesuatu hal yang biasa khususnya dalam pilkades di desa Siru. Politisasi etnis tidak dianggap sebuah pelanggaran karena kecenderungan masyarakat adalah memilih berdasarkan persamaan etnis karena pada masyarakat yang majemuk di desa ini memiliki nilai solidaritas tinggi dalam masing-masing etnis” (Hasil wawancara, 24 Juni 2018).

Dari kutipan wawancara tersebut, politik identitas bukan lagi hal baru dalam kontestasi politik di desa Siru. Praktek politisasi etnis tersebut sudah menjadi bagian penting untuk memobilisasi massa yang dimuat dalam materi kampanye masing-masing calon. Kondisi sosiokultural masyarakat desa Siru yang menjunjung nilai primordial atau ikatan kekeluargaan menjadi potensi yang kemudian dikonstruksikan dalam kampanye politik untuk kemudian masyarakat digiring memilih beerdasarkan etnisitas. Instrumentalisme lebih menekankan perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas atribut awal seperti etnisitas, kebangsaan, agama, ras dan bahasa (Aini dalam Kinasih, 2005 : 17).

Berikut ini pernyataan salah seorang tokoh pemuda desa Siru, Bapak JM (29 Tahun):

“Masyarakat desa Siru tau betul bahwa mereka memiliki perbedaan etnis satu dengan lainnya. Dalam suasana tahun politik biasanya dijadikan basis oleh yang berkepentingan untuk memilih berdasarkan garis keturunan” (Hasil wawancara, 24 Juni 2018).

Dari pernyataan informan di atas, dalam pendekatan instrumentalisme menjelaskan bahwa makna politik etnis adalah upaya melakukan politisasi etnis dalam rangka mengejar kepentingan politik. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward Aspinall (2011) yang menjelaskan bahwa politik etnis merupakan upaya untuk melakukan mobilisasi atau menggunakan etnis dengan berdasarkan pada kesadaran akan adanya perbedaan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Kesadaran tersebut yang merupakan hasil konstruksi dari politisasi etnis menjadi basis dalam merebut kekuasaan.

Tindakan manipulasi etnis dalam memobilisasi masa pada pilkades di desa Siru sudah menjadi sesuatu yang turun temurun (*given*) tidak bisa dibantah. Salah seorang informan saudara AS (22 Tahun) memberikan informasi sebagai berikut:

“Ini adalah bagian dari strategi politik, kondisi masyarakat yang multi-etnis seperti ini menjadi modal sebagai basis dan kita tidak tau kapan berakhirnya” (Hasil wawancara, 25 Juni 2018).

Dari pernyataan tersebut, politik identitas sudah tumbuh dan terus dipakai dalam strategi politik memenangkan pilkades di desa Siru. Perspektif *instrumentalisme*, dalam pandangan ini identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan. Instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas

dasar atribut-atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras, dan bahasa (Aini dalam Kinasih, 2005: 17).

2. Dampak Politik Identitas Etnis dalam Pilkadaes di Desa Siru

Gejala dan dampak dari politik identitas, di beberapa daerah bisa dijadikan suatu referensi bahwa selain menguatkan integritas dalam suatu kelompok pada waktu yang sama juga terjadinya suatu kondisi disintegrasi dalam masyarakat. Politisasi SARA seringkali menjadi pemicu hadirnya konflik dalam masyarakat. Berangkat dari suatu peran politik identitas di desa Siru dalam kontestasi pilkades maka tentu memiliki dampak baik di dalam etnis maupun antar etnis. Berikut hasil pengamatan mengenai dampak politik identitas:

“Etnis Ndahe dengan penerapan strategi politik yang apik yaitu agenda pertemuan di dalam etnis sangat intens dengan tujuan menyatukan komitmen bersama memenangkan kontestasi semakin menguatkan integritas kelompok” (Hasil pengamatan, 22 Juni 2018).

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, politik identitas memiliki pengaruh yang sangat besar terkhusus pada masyarakat yang multi etnis seperti di desa Siru. Identitas sudah dimaknai sebagai instrument dalam agenda politik. Berkaca dari sifat identitas yang dinamis, politik identitas selalu dikonstruksi dan dan dipertahankan secara refleksif dengan berdasarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan (Widayanti, 2009: 21). Sehingga disaat identitas bergeser ke arah kepentingan yang berubah, bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politis.

Dalam pengamatan peneliti yang berkaitan dengan dampak dari peran politik identitas tersebut satu bukti adalah dominasi posisi di dalam birokrasi pemerintahan desa.

“Jabatan ini dalam birokrasi pemerintahan desa Siru didominasi oleh etnis Ndahe. Kenyataan ini tidak terlepas dari pengaruh identitas etnis” (Hasil pengamatan, 22 Juni 2018).

Kenyataan diatas menunjukkan suatu paradoks dalam demokrasi. Praktek kebijakan seperti ini adalah cerminan dari otoriterianisme dalam pengambilan suatu keputusan. Jika melihat catatan sejarah, khususnya dalam pemerintahan pusat pada era kepemimpinan Soeharto memperoleh suatu referensi bahwa seperti apa bobroknnya suatu sistem sehingga hadir berbagai masalah seperti ketidakadilan, korupsi dan sebagainya.

Sementara itu, baik etnis Tere, Jombok dan Pa’ang kurang lebih keadaannya sama dengan etnis Ndahe terkait integritas dalam kelompok. Kolektivitas yang terbangun merupakan suatu sikap komitmen dan tujuan yang sama sehingga menguatnya integritas. Akan tetapi jika bergeser pada dampak negatifnya adalah tumbuh perpecahan karena masing-masing etnis menanamkan sikap ego atau etnosentrisme sehingga mengabaikan persatuan di tengah-tengah perbedaan yang disebabkan oleh konstruktifitas identitas politik etnik.

Mengutip Widayanti (2009 : 18) secara filosofis identitas merupakan konsep yang mempunyai dua pengertian di dalamnya yaitu *singleness over time* dan *samenessamid difference*. Berarti terdapat dua konsep mengenai identitas yaitu persamaan dan perbedaan. Hal inilah yang disebut konstruksi keakuan (*selfness*) dan yang lain (*the other*). Individu mengidentifikasikan diri mereka dan orang lain. ketika individu membentuk siapa dirinya maka secara otomatis ia akan mencari negasinya atau *the other*. Berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Bapak ZF (29 Tahun):

“Di desa Siru pada waktu kampanye biasanya masing-masing etnis melakukan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk menyatukan pikiran mendukung calon yang diusung dari etnisnya. Sehingga solidaritas dan kekompakan dalam masing-masing etnis memiliki pengaruh yang potensial dalam merebut kekuasaan” (Hasil wawancara, 22 Juni 2018).

Dari wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa sangat relevan dengan kutipan (Widayanti 2009 : 18) bahwa dalam politik identitas terdapat proses yaitu individu mengidentifikasi diri mereka dan orang lain. ketika individu membentuk siapa dirinya maka secara otomatis ia akan mencari negasinya atau *the other*. Untuk mengetahui informasi mengenai dampak dari politik identitas tersebut, berikut kutipan wawancara dengan Bapak AA (72 Tahun):

“Dampak positifnya adalah ikatan kekeluargaan khususnya masing-masing etnis sangat kuat dimana mereka memiliki satu kekompakan yang berorientasi kepentingan kelompok sedangkan dampak negatifnya terjadi suatu kondisi politik yang mana masyarakat di dalamnya saling mencibir dan mengunggulkan calon dari etnis masing-masing. Adapun hal tersebut tidak sampai pada proses penyelesaian masalah di ranah hukum” (Hasil wawancara, 22 Juni 2018).

Berkaitan dengan dampak dari peran politik identitas etnis tersebut, berikut pernyataan dari ZF (29 Tahun):

“Dampak positifnya adalah memperkuat tali silaturahmi sedangkan dampak negatifnya bermula dari sikap ego yang berlebihan biasanya memunculkan suhu politik yang panas sehingga kata-kata kotor banyak keluar” (Hasil wawancara, 22 Juni 2018).

Berkaitan dengan tanggapan terkait peran politik identitas etnis di desa Siru, berikut ini adalah pernyataan JM (29 Tahun):

“Menurut saya adalah ini menjadi ajang silaturahmi, maka untuk itu harus dirawat terus. Nilai-nilai di dalamnya adalah salah satunya meningkatkan solidaritas” (Hasil wawancara, 23 Juni 2018).

Melihat pernyataan informan di atas, masyarakat menanggapi hal tersebut sebagai hal yang biasa-biasa saja. Justru di dalam dinamika penerapan politik

identitas membuka ruang komunikasi di dalam masing-masing etnis sehingga memungkinkan tumbuhnya solidaritas kelompok. Meskipun pada sisi lain tidak bisa kita lihat bagaimana pembelahan terjadi yaitu antar etnis memiliki egoisme dan berimplikasi terjadinya konflik.

Politik identitas dalam kontestasi politik pilkades desa Siru menciptakan suatu kondisi masyarakat integritas dalam suatu kelompok di sisi lain terjadinya suatu disintegrasi atau perpecahan antar kelompok. Disintegrasi atau konstalasi dalam perpolitikan tersebut dinilai tidak terlalu mengancam kehidupan sosial masyarakat setempat sehingga tidak memerlukan suatu proses hukum dalam menangani persoalan tersebut. Satu hal yang menjadi pemicu utama konflik adalah kesadaran semua anggotanya terhadap suatu kelompok etnis yang berlebihan atau sitilah etnosentrisme. Sikap seperti ini, mencerminkan keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok etnisnya yang dapat mengganggu kontak atau keguyuban antar etnik, bahkan dapat menimbulkan diskriminasi, buruksangka, kekerasan dan konflik antar etnis (Darity, 2005).

Mengutip wawancara dengan Bapak GM (60 Tahun) sebagai berikut:

“Politisasi etnis ini berpengaruh nantinya dalam menentukan jabatan pada birokrasi berdasarkan kesamaan etnis. Contohnya adalah jabatan sekretaris desa, kepala kaur dan lainnya. Hal ini sudah jadi rahasia umum dan tidak bisa ditolak karena logikanya etnis manapun yang menduduki jabatan kepala desa pasti dalam menempatkan seseorang untuk jabatan tertentu dalam birokrasi di dominasi oleh orang-orang yang notabenenya memiliki kedekatan emosional atau garis keturunan” (Hasil wawancara, 26 Juni 2018).

Dari wawancara tersebut, semakin jelas bahwa politik identitas memang tidak hanya bertujuan untuk memenangkan kontestasi melainkan adalah ada hal-hal lain yang ingin dicapai yaitu melakukan dominasi kekuasaan ketika menjabat

sebagai kepala desa. Sehingga asumsi-asumsi terkait politisasi identitas etnis terbukti merupakan suatu strategi untuk tujuan politis yang dibangun dan terorganisir.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa eksistensi etnis di desa Siru yaitu Ndahe, Tere, Jombok dan Pa'ang memiliki peran andil dalam perpolitikan khususnya pada saat tahun politik seperti pilkades. Dalam ruang lingkup tersebut, ada dua hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan bagaimana peran dan dampak dari politik identitas etnis di desa Siru selama pilkades.

1. Peran Politik Identitas Etnis Dalam Pilkades di Desa Siru

Dari berbagai wawancara dan observasi diperoleh informasi bahwa politik identitas etnis memiliki pengaruh yang besar dalam setiap pilkades di desa Siru. Ada tiga hal pokok dalam strategi kemenangan masing-masing calon kepala desa, penulis dalam memudahkan penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu tindakan manipulasi dan mobilisasi, dominasi sosial dan solidaritas politik. Ketiga pendekatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Tindakan Manipulasi dan Mobilisasi

Peran politik identitas etnis dalam penerapannya sangat sistemik dan terorganisir yakni seperti yang dipaparkan dalam sub hasil penelitian diatas merangkul individu yang berdasarkan kesamaan etnis untuk menguatkan basis kemenangan. Realitas politik identitas tersebut sudah turun temurun atau sesuatu yang *given*. Masyarakat dalam memilih pemimpin pada akhirnya

kecenderungannya adalah orientasi etnis. Pada masyarakat yang multi etnis seperti di desa Siru menjadi sangat mungkin dengan melihat realitas politisasi etnis yang dilakukan oleh orang-orang berkepentingan.

Berdasarkan teori instrumentalisme di atas, elit-elit yang kerap menggunakan identitas etnis dalam penyelenggaraan kontestasi tersebut adalah dengan melihat struktural masyarakat yang tersusun berdasarkan klasifikasi etnis. Hal ini memang tidak heran, hemat penulis bahwa politisasi identitas bukan sesuatu hal yang baru dalam sejarah demokrasi negeri ini. Jika melihat strategi elit-elit politik di desa Siru sangat terorganisir, pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam ruang sosialisme dilakukan secara intens.

Dari pendekatan instrumentalisme tersebut menjelaskan bahwa makna politik etnis dalam penelitian ini adalah upaya melakukan politisasi etnis dalam rangka mengejar kepentingan politik. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward Aspinall (2011) yang menjelaskan bahwa politik etnis merupakan upaya untuk melakukan mobilisasi atau menggunakan etnis dengan berdasarkan pada kesadaran akan adanya perbedaan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh kekuasaan negara, mempengaruhi kebijakan pemerintah, maupun mempengaruhi struktur dari institusi Negara.

Teori instrumentalisme yang dicetus oleh Paul Brass dan David Brown, berkaca dari sifat identitas yang dinamis, politik identitas selalu dikonstruksi dan dipertahankan secara reflektif dengan berdasarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan (Widayanti, 2009: 21). Sehingga disaat identitas bergeser ke arah kepentingan yang berubah, bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang

bersifat politis. Disaat adanya politisasi identitas, identitas itu bergerak kepentingan, identitas yang pada mulanya adalah *base on identity* dan *base on interest* telah dijadikan instrumen untuk mendapatkan simpatidari masyarakat. Jadi dasar terjadinya politik identitas karena adanya suatu kelompok yang memiliki berbagai kepentingan.

Realitas politik identitas tersebut, dapat dilihat bahwa etnis khususnya di desa Siru dipolitisasi atau dimanfaatkan sebagai instrumen dalam mengejar keuntungan ekonomi dan politik. Pada aspek ini, etnisitas tidak lagi sebagai kelompok etnis berjuang melakukan upaya afirmasi. Namun lebih daripada itu, identitas etnis dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengejar kepentingan politik. Hal ini sangat menarik untuk dicermati karena memperlihatkan suatu paradoks demokrasi dimana pada satu sisi kebebasan dan keberagaman semua kelompok harus dijamin, namun di sisi lain ternyata kebebasan dan keberagaman tersebut dapat digunakan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu.

b. Dominasi Sosial

Manusia sebagai makhluk multidimensi memiliki perbedaan-perbedaan berdasarkan beberapa kriteria yang terdiri dari cirri fisiologis, kebudayaan, ekonomi dan perilaku (Kinloch via Kamanto Sunarto, 1993). Perbedaan ini menyebabkan manusia masuk ke dalam kelompok-kelompok sosial tertentu sehingga tercipta masyarakat multikultural. Desa Siru seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa tergolong multi etnis, dimana tiap-tiap individu mengidentifikasikan dirinya di dalam masyarakat berdasarkan etnisitas.

Teori dominasi sosial yang dicetuskan oleh Jim Sidanius dan Felicia Pratto, menjelaskan bahwa setiap kelompok sosial yang luas selalu terbentuk struktur hirarki sosial. Hal ini berarti terdapat sejumlah individu atau kelompok yang memiliki kedudukan berbeda yaitu kelompok individu atau dominan yang berada pada bagian atas hirarki dan kelompok atau subordinat yang berada di bawah hirarki. Teori ini menggambarkan realitas yang terjadi di desa Siru, ada stereotif, diskriminasi dan intimidasi. Dalam pandangan teori ini yang menyangkut kedudukan atau jabatan, pada masyarakat desa Siru dimana menjamurnya politisasi etnik memungkinkan terjadinya diskriminasi yang dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas atau dalam teori ini terdapat suatu proposisi kelompok dominan dengan subordinat.

Berdasarkan teori Sidanius dan Pratto, konsep terbesar dari kerangka berpikir orientasi dominasi sosial terdiri atas dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang cenderung disusun berdasarkan kelompok-kelompok hierarki, dimana paling tidak terdapat satu kelompok atau individu yang berada di atas dan satu kelompok atau individu yang berada di bawahnya. Asumsi kedua, hierarki atau tingkatan dapat didasarkan pada usia, jenis kelamin, kelas sosial, ras, kebangsaan dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai pembeda diantara kelompok atau individu yang berbeda. Etnis Ndahe yang merupakan etnis dominan kerap menggunakan politisasi etnis sebagai strategi memenangkan calon. Jumlah penduduk etnis Ndahe yang dominan dimanfaatkan sebagai basis sehingga masyarakat preferensi memilihnya berdasarkan etnisitas. Strategi tersebut dengan kuasa dominasi yang dimiliki

memiliki pengaruh dan buktinya adalah sejak periode pertama pelaksanaan pilkades di desa Siru hingga periode sekarang etnis Ndahe keterwakilannya lebih banyak menduduki jabatan.

Manusia memiliki kecenderungan untuk membentuk hirarki berdasarkan kelompok-kelompok sosial dimana setidaknya terdapat satu kelompok yang menikmati status sosial yang lebih baik dan kekuatan yang lebih besar dibandingkan kelompok lain. Anggota kelompok sosial dominan akan menikmati bagian yang lebih besar dari nilai sosial positif, atau materi yang diinginkan yang berasal dari sumber-sumber tertentu seperti kekuasaan politik, kekayaan, perlindungan dengan kekuatan dan lain sebagainya. Menyoroti realitas di desa Siru, etnis dominan yaitu Ndahe mendominasi kedudukan sebagai birokrat pemerintahan desa Siru. Hal tersebut merupakan tindakan politis demi mewujudkan keuntungan ekonomi dan hal lainnya. Kekuasaan politik yang dimiliki oleh sebagian besar etnis Ndahe adalah suatu wujud dominasi kekuasaan sehingga anggota kelompok tersebut memperoleh bagian yang lebih besar.

c. Solidaritas Politik

Ost (1998) dalam *Solidarity And The Politics Of Anti Politics: Opposition And Reform In Poland Since 1968*, menyebutkan bahwa solidaritas politik merupakan gejala postmodern politik. Gejala ini ditandai dengan akomodirnya kekuatan sosial dalam politik. Ost melihat politik sebagai alat dan tujuan sekaligus. Karena sebagai alat dan tujuan sekaligus maka politik memang harus menyertakan banyak aspek di dalamnya. Banyak aspek itu harus disertakan agar elit politik bisa mendapatkan kekuasaan dalam alam liberalisasi politik.

Masuknya etnis dalam politik lokal di desa Siru adalah suatu gambaran bahwa etnisitas merupakan sebagai alat dan tujuan dalam merebut kekuasaan politik.

Gerakan sosialisme semu dianggap mampu mencapai tujuan itu. Dengan demikian warga Siru sebagai konstituen dibuat dan dilakukan sama seperti logika sosialis. Berikutnya adalah menggunakan semua potensi dalam alam sosialisme itu untuk mencapai tujuan. Maka etnis digunakan untuk tujuan politik. Solidaritas politik diikat dengan tali sosial budaya di ruang sosialisme. Sosialisme semu adalah gejala dimana nilai sosialisme dipakai untuk tujuan politik. Sosialisme semu di desa Siru ditunjukkan dengan melakukan pertemuan yang intens di dalam suatu kelompok. Gagasan ini dipelopori oleh elit-elit politik, dengan pertemuan tersebut komitmen untuk memenangkan kontestasi yang dibangun oleh kolektivitas kelompok etnis dimungkinkan berpeluang besar untuk mencapai tujuan.

Hal tersebut di atas bisa dikatakan suatu realitas politik fragmentatif. Yang muncul kemudian adalah bukan solidaritas sosial tetapi solidaritas politik. Solidaritas sosial memunculkan soliditas sosial sedangkan solidaritas politik berujung pada terpusatnya kekuasaan karena kepentingan tertentu. Dalam ruang solidaritas politik kegiatan politik diarahkan untuk tujuan kelompok bukan tujuan bersama. Jika melihat gerak-gerik elit politik lokal desa Siru, sulit untuk tidak mengatakan bahwa solidaritas politik kental menghiasi ruang politik.

2. Dampak Politik Identitas Etnis Dalam Pilkades di Desa Siru

Dampaknya adalah baik disadari atau tidak disadari memiliki implikasi baik dalam intra etnis maupun antar etnis. Dari informasi yang diperoleh dari

wawancara dan observasi menunjukkan bahwa peran politik identitas etnis khususnya dalam masing-masing intra etnis memiliki dampak positif dan negatif.

a. Dampak Positif

Geliat politik local di desa Siru menjurus ke arah dinamis. Semua kontestan disibukkan dengan bagaimana menerapkan cara-cara dalam mempengaruhi konstituen atau masyarakat pemilih. Menyoroti pendekatan yang dilakukan oleh elit-elit politik yaitu kontestan dalam penyelenggaraan pilkades tersebut, menunjukkan suatu pendekatan yang terstruktur. Melihat masyarakat yang cenderung berada dalam suatu sistem primordialis atau suatu ikatan kekeluargaan yang kuat maka kemudian masuk politik identitas sehingga tercipta suatu ruang integrasi dalam masing-masing etnis.

Dampak positif dari peran politik identitas etnis ini yaitu semakin menguatnya persatuan atau integritas masing-masing etnis karena kesadaran kolektif kelompok. Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa kolektivitas kelompok ini terbangun oleh konstruksi elit-elit politik yang sistemik dan terorganisir. Individu-individu diakomodir ke dalam ruang politik yang semu dimana situasi demokrasi yang paradoks terpampang nyata. Dalam situasi sosialisasi semu yang diungkapkan oleh Ost, menumbuhkan suatu solidaritas politik dengan berdiri di atas kepentingan kelompok.

Dari aspek etnis Ndahe, Tere, Jombok dan Pa'ang khususnya pada tahun politik terciptanya suatu kondisi kerekatan pada masing-masing etnis. Politik identitas tersebut semakin memperjelas identitas individu-individu di dalam masyarakat, melalui konstruktivisme oleh elit-elit politik sebagai alat dan tujuan

politik. Solidaritas politik yang dibangun tersebut adalah mobilisasi massa dengan menjanjikan kesejahteraan kelompok sehingga kekuatan persaudaraan dalam etnis terakomodir dengan baik.

b. Dampak Negatif

Politik identitas yang turut serta dalam tahun pemilu pilkades di desa Siru adalah realitas yang sudah terbangun lama. Implikasinya adalah menciptakan suatu realitas sosial yang membelah dan membagi masyarakat berdasarkan etnisitas. Hal tersebut sangat fragmentatif karena dinamika politik bergerak ke zona keterpecahan sosial, sungguh sebuah kenafian politik atau faktualitas politik. Solidaritas politik bersifat politis karena kepentingan kekuasaan.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak (Wirawan; 2010: 1-2).

Konflik yang terjadi selama penyelenggaraan pilkades di desa Siru adalah konflik yang bersifat struktural. Dalam masyarakat yang pluralis yakni keberadaan empat etnis adalah menunjukkan konstalasi politik yang bersuhu panas. Komunikasi memiliki peranan penting dalam konstruksi etnis oleh elit-elit

politik. Narasi sempit dengan memperjuangkan kesejahteraan kelompok membuat peta konflik semakin nampak di permukaan. Ruang sosialisme masyarakat menjurus ke arah perpecahan karena langgengnya sekte-sekte.

Kesadaran persamaan dan perbedaan dalam masyarakat yang mana berawal dari faktor politis mewujudkan sikap etnosentrisme pada masing-masing etnis. Khususnya dalam tahun politik tersebut masing-masing kelompok etnis berdiri atas kepentingan kelompok. Hal tersebut kemudian memicu konflik karena sikap etnosentrisme yang ditunjukkan dengan merendahkan satu sama lain. Konflik yang terjadi tergolong konflik yang kecil dan tidak menimbulkan korban jiwa, maka dalam penyelesaian konflik tersebut adalah tergantung pada kesadaran antar etnis yang berkonflik.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, *Pertama*; bahwa dalam kontestasi pilkades di desa Siru terjadi yang namanya politisasi etnis. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa masyarakatnya majemuk sehingga kemudian oleh orang-orang yang berkepentingan menjadikan potensi tersebut sebagai instrumen dalam merebut kekuasaan. Wujud dari politisasi etnis ini adalah, masing-masing etnis yang memiliki perwakilan sebagai calon kepala desa melakukan komunikasi yang intens di dalam kelompok etnisnya dimana tujuannya adalah untuk menguatkan basis.

Kedua; bahwa politik identitas etnis sebagai jargon dalam memanipulasi dan memobilisasi massa menciptakan dua kondisi atau situasi yakni menguatnya integritas dalam masing-masing etnis dan pada waktu yang sama terjadi perpecahan antar etnis. Satu hal yang melatarbelakangi disintegrasi antar etnis tersebut adalah faktor etnosentrisme atau suatu sikap berlebihan menganggap etnisnya lebih dari etnis lainnya. Sikap etnosentrisme ini dalam konteks politik adalah ditunggangi oleh suatu kepentingan politik. Pada saat menjabat sebagai kepala desa, semakin terlihat bahwa kepentingan politik tadi berpengaruh dalam pengambilan sikap seorang pejabat kepala desa ketika menentukan seorang menduduki jabatan di birokrasi tersebut.

B. Saran

Politik identitas berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat baik yang disebabkan oleh ego etnosentrisme, manipulasi dan ketidakadilan. Motif utama atau pemicu politisasi etnis adalah kepentingan politik yang menurut Undang-Undang langkah tersebut tidak demokratis. Maka dari itu, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Di dalam masyarakat sudah terdapat potensi konflik apalagi pada masyarakat majemuk seperti di desa Siru, maka jangan kemudian orang-orang berkepentingan mempolitisasi etnis karena nafsu kekuasaan yang sesat. Jika hal tersebut terjadi akan hadir sebuah konflik yang bereskalasi terus menerus.
2. Kepada pihak masyarakat jangan menerima politik yang tidak mendidik, gunakan rasionalitas dalam menjatuhkan pilihan pada calon kepala desa. Pahami visi misi dan programnya bukan membiarkan apalagi memilih dengan mengedepankan kesamaan ideologis atau etnis.
3. Kepada panitia pengawas pemilu harus pro aktif terhadap politisasi etnis dalam materi kampanye masing-masing calon. Berikan aturan dan sanksi tegas terhadap calon-calon yang melanggar aturan dalam berkampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ubed, 2002. *Politik Identitas Etnis;Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang: Indonesiaterra.
- Afif. 2012:18. *Pola Interaksi Individu dalam Kelompok Sosial*. Unpad: Komunikasi Politik.
- Asmore, Richard, D.; Jussim, L. Dan Wilder, David. (Eds.). 2001. *Socail Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Banks. 2005. *Ethnicity: Anthropological Constructions*. London: Routledge.
- Barker.2004: 416.*Ethnicity and Nationalism (anthropological perspec-tive)*. London:Pluto Press.
- _____2006:91.*Sosiologi Dasar* (terjemahan),London:Pluto Press.
- Budiharjo, Miriam, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2002.*Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chriost, Darmait Mac Giolla. 2003. *Language, Identity and Conflict: A Comparative studyof language in ethnic conflict in Europe and Eurasia*. New York: Routledge.
- Daniel, N. Ponser. 2007. *Perilaku Politik Pemilih*(terjemahan), London: Routledge.
- Darity. 2005. *International Encyclopedia of the Social Sciences*. 2n ed. Volume 3. New York: Macmillan Reference.
- Dian, G. Pruit. 2004:27.*Sosiologi Umum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Edward, Aspinall, 2011. *The Power of Simbols* (terjemahan), (2011, Yogyakarta: Kanisius).
- Mariana, Dede. 2008:62. *Mekanisme Pemilihan Kepala Desa*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Firmansyah, Dedi. “*Peran Politik Etnis dalam Pilkada ; Studi Atas Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2009.*” Skripsi Fakultas Syari’ah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2009).

- Faisal, Sanapiah. 2003:8-9. *Pengumpulan dan Analisis data Dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- FKIP, 2018. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, FKIP-Universitas Muhammadiyah Makassar.
- H. Gayatri, Irene. *Makalah Demokrasi Lokal (di Desa)*, Bandung, 16 April 2007
- Harison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Ilmu Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Irianti. 2003:202. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003) h.202.
- Kemala. 1989. *Atribut Identitas dalam Kajian Semiotik Bahasa*. Jakarta : Bina Aksara.
- Khairuddin. 2009. "Politik Etnis dalam Perebutan Kekuasaan Mmenjelang Pemilu 2009; Studi Atas Partai Politik Islam di Kota Pontianak." Skripsi Fakultas Syari'ah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Kinasih. 2005:17. *Pembentukan Identitas dalam Perspektif Konstruktivisme*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Nawawi, Dkk. 2010. "Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik pada *Pemilukada*": Studi kasus pilkada di kabupaten Poso.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bina Aksara.
- P.H. Collin. 2004:257. *Political Theory –Hand Book of Political Science Vol. 2*, (Addision– Wesley Publishing Company).
- Prihartanti, Nanik dkk, *Jurnal Penelitian Humaniora, Mengurai Akar Kekerasan Etnis Pada Masyarakat Pluralitas*, Vol.10.No.2 Agustus 2009, 108.
- Putri, 2004. *Pembentukan Identitas dalam Perspektif Primordialisme*. Viavegitya.unsri.ac.id
- Ramsey, Patricia.G; William, Leslie, R. Dan Vold, Edwina, Battle. 2003. *Multicultural Education: A Source Book*. 2nd ed. London: Routledge Palmer.
- Ratcliffe, P. 2006. *Conceptualizing "Race", Ethnicity and Nation: Towards a Comparative Perspective in Ratcliffe, P. (Ed). Race, Ethnicity and Nation*. London: Taylor & Francise.
- S. Nasution, 2010:126. *Metode Analisis Data*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2005:62. *Pengertian Data Sekunder*. Jakarta : Kencana Prenada.

_____2005:89. *Memahami Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada.

Sumaryanto. 2010:76. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.

Sunardjo, Unang. 2004. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Tarsito.

Surbakti, Ramlan. 2005. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Kencana Prenada.

Sutopo. 2006:139. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.

Tirtosudarmo. 2007:143. *Konstruktivisme Identitas Politik*. Yogyakarta: Mata Bangsa.

Umar.2003:56,*Pengertian Data Primer*. Wikipedia.

Widayanti. 2009: 18.*Konsep Mengenai Identitas*. Yogyakarta:Mata Bangsa.

Wijaya, H.A.M. 2008. *Otonomi Desa*.Jakarta : PT. Grafindo Persada.

Wirawan. 2010:1-2. *Konflik-Konflik dalam Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.

Peraturan Perundangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah

Sumber Lain:

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat 2017

Dinas Dukcapil Kab. Manggarai Barat 2017

Kepala seksi pemerintahan desa Siru

Lembar Observasi

Tempat Observasi : Desa Siru

No.	Aspek yang diamati	Keterangan
1.	Deskripsi umum daerah penelitian	
2.	Deskripsi khusus latar penelitian	
3.	Peran politik identitas etnis dalam pilkades	
4.	Dampak politik identitas etnis dalam pilkades	

Pedoman Wawancara

Berikut ini adalah pedoman wawancara dalam penelitian :

1. Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkades di desa Siru?
2. Bagaimana peran politik identitas di desa Siru dalam memenangkan kontestasi pilkades?
3. Dari empat etnis di desa Siru, etnis apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?
4. Secara kuantitas, etnis apa yang memiliki jumlah penduduk dominan di desa Siru?
5. Apakah yang menjadi preferensi anda dalam menentukan pilihan dalam pilkades?
6. Bagaimana tanggapan anda terhadap eksistensi politik identitas etnis di desa Siru?
7. Apa dampak positifnya dari penerapan politik identitas tersebut?
8. Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas tersebut?
9. Bagaimana penyelesaian konflik di desa Siru pada saat pilkades?

Data Informan dalam Wawancara

1. Nama : Ali Mustaram (AM)
Umur : 58 Thn
JenisKelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Wongkol
2. Nama : Ahmad Ambe (AA)
Umur : 72 Thn
JenisKelamin : Laki-Laki
Jabatan : Tokoh Adat
Alamat : Watu Lendo
3. Nama : Rustam (RT)
Umur : 25 Thn
JenisKelamin :Laki-Laki
Jabatan :Tokoh Pemuda
Alamat :Wongkol
4. Nama : Jumaidin (JM)
Umur : 29 Thn
JenisKelamin :Laki-Laki
Jabatan :Tokoh Pemuda
Alamat :Ngalor Kalo
5. Nama : Siti Samsia (SS)
Umur : 55 Thn
JenisKelamin :Perempuan
Pekerjaan :Petani
Alamat :Watu Lendo
6. Nama : Gabi Mustafa (GM)
Umur : 60 Thn
JenisKelamin :Laki-Laki
Pekerjaan :Petani
Alamat :Ngalor Kalo

7. Nama : Ahmad Esa (AE)
Umur : 50 Thn
JenisKelamin :Laki-Laki
Pekerjaan :Petani
Alamat :Watu Lendo
8. Nama : Ahmad Salim (AS)
Umur : 22 Thn
JenisKelamin :Laki-Laki
Pekerjaan :Petani
Alamat :Watu Lendo
9. Nama : Zulfahmi (ZF)
Umur : 29 Thn
JenisKelamin :Laki-Laki
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Alamat :Wongkol

Data Hasil Wawancara

Nama : Ahmad Ambe
 Jabatan : Tokoh Adat
 Hari/tgl wawancara : Jum'at, 22 Juni 2018
 Tempat : Wongkol, desa Siru

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkades di desa Siru	<i>"Peran etnis bisadikatakan berpengaruh dalam pilkades di desa Siru, apalagi pada masyarakat pedesaan ikatan primordialnya sangattinggi".</i>
2.	Bagaimana peran politik identitas di desa Siru dalam memenangkan kontestasi pilkades?	<i>"Seperti biasanya kontestan dalam pilkades melakukan pendekatan dengan sesama etnisnya. Tujuannya adalah untuk mendapat dukungan. Dalam pertemuan tersebut sangat kuat nilai budaya di dalamnya yakni dengan dirangkaikan do'a".</i>
3.	Dari empat etnis di desa Siru, etnis apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?	<i>"Yang mendominasi sampai pada periode ini adalah etnis Ndahe".</i>
4.	Secara kuantitas, etnis apa yang memiliki jumlah penduduk dominan di desa Siru?	<i>"Etnis Ndahe memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan ketiga etnis lainnya".</i>
5.	Apakah yang menjadi preferensi anda dalam menentukan pilihan dalam pilkades?	<i>"Menurut saya tidak menjadi masalah apalagi ini memudahkan kontestan yang didukung bisa menang".</i>
6.	Bagaimana tanggapan anda terhadap eksistensi politik identitas etnis di desa Siru?	<i>"Menurut saya adalah ini menjadi ajang silaturahmi, maka untuk itu harus dirawat terus. Nilai-nilai di dalamnya adalah salah satunya meningkatkan solidaritas.</i>
7	Apa dampak positifnya dari	<i>"Dampak positifnya adalah ikatan kekeluargaan khususn yamasing-</i>

	penerapan politik identitas tersebut?	<i>masing etnis sangat kuat dimana mereka memiliki satu keompokan yang berorientasi ke penting kelompok”.</i>
8	Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>“dampak negatifnya terjadi di suatu kondisi politik yang di manamasyarakat di dalamnya saling membenci dan mengunggulkan calon dari etnis masing-masing.”.</i>
9.	Bagaimana penyelesaian konflik di desa Siru pada saat pilkades?	<i>“Adapun hal tersebut tidak sampai pada proses penyelesaian masalah di ranah hukum dimana pihak yang berkonflik akan diurus oleh tokoh adat tergantung pada tingkatan konflik”.</i>

Nama : Zulfahmi
 Jabatan : Tokoh Masyarakat
 Hari/tgl wawancara : Jum'at, 22 Juni 2018
 Tempat : Wongkol, desa Siru

N o.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkades di desa Siru	<i>“sangat berpengaruh tentunya dalam tahun politik pilkades di desa Siru”.</i>
2.	Bagaimana peran politik identitas di desa Siru dalam memenangkan kontestasi pilkades?	<i>“Politik identitas sangat jelas memiliki peranan penting dalam strategi memenangkan calon. Di desa Siru khususnya, masing-masing calon melakukan pendekatan dengan kelompok etnisnya yang tujuannya adalah mengumpulkan kekuatan untuk menguatkan basis dalam memenangkan pilkades”.</i>
3.	Dari empat etnis di desa Siru, etnis apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?	<i>“etnis Ndahe”.</i>
4.	Secara kuantitas, etnis apa yang memiliki jumlah penduduk dominan di desa Siru?	<i>“Etnis Ndahe lebih mendominasi”.</i>
5.	Apakah yang menjadi preferensi anda dalam menentukan pilihan	<i>“preferensi dalam memilih tentunya adalah berdasarkan etnisitas, ini menyangkut nama baik etnis”.</i>

	dalam pilkades?	
6.	Bagaimana tanggapan anda terhadap eksistensi politik identitas etnis di desa Siru?	<i>"Sudah menjadi hal biasa".</i>
7	Apa dampak positifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>"Dampak positifnya adalah memperkuat tali silaturahmi".</i>
8	Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>"Bermula dari sikap ego yang berlebihan biasanya memunculkan suhu politik yang panas sehingga kata-kata kotor banyak keluar".</i>
9.	Bagaimana penyelesaian konflik di desa Siru pada saat pilkades?	<i>"konflik biasanya diselesaikan secara adat artinya tidak ada keterlibatan pihak kepolisian".</i>

Nama : Siti Samsia
 Jabatan : Masyarakat biasa
 Hari/tgl wawancara : Sabtu, 23 Juni 2018
 Tempat : Wongkol, desa Siru

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkades di desa Siru	<i>"Ia, memiliki pengaruh".</i>
2.	Bagaimana peran politik identitas di desa Siru dalam memenangkan kontestasi pilkades?	<i>"Kami biasanya berkumpul di dalam masing-masing etnis membicarakan terkait kontestasi tersebut. Disitu kemudian menyatukan komitmen untuk mendukung kontestan yang diusung dari etnis kami.</i>
3.	Dari empat etnis di desa Siru, etnis apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?	<i>"Etnis Ndahe".</i>
4.	Secara kuantitas, etnis apa yang memiliki jumlah penduduk dominan di desa Siru?	<i>"Etnis Ndahe".</i>
5.	Apakah yang menjadi preferensi anda dalam menentukan pilihan dalam	<i>"sayakalauditanyapilihsiapasaatpilkades, sayajawabpastisayaakanmemilih orang terdekatsecaraetnis".</i>

	pilkades?	
6.	Bagaimana tanggapan anda terhadap eksistensi politik identitas etnis di desa Siru?	<i>“sudah hal biasa”.</i>
7	Apa dampak positifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>“Merekatkan tali kekeluargaan”.</i>
8	Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>“Kadang-kadang ada konflik karena saling mengunggulkan kontestan dari etnis masing-masing”.</i>
9.	Bagaimana penyelesaian konflik di desa Siru pada saat pilkades?	<i>“Tokoh adat punya kewenangan dalam menangani hal tersebut”.</i>

Nama : Ali Mustaram
 Jabatan : Mantan Kepala Desa Siru
 Hari/tgl wawancara : Sabtu, 23 Juni 2018
 Tempat : Wongkol, desa Siru

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkades di desa Siru	<i>“Sangat berpengaruh”.</i>
2.	Bagaimana peran politik identitas di desa Siru dalam memenangkan kontestasi pilkades?	<i>“Politik identitas tidak bisa dihindari dalam masyarakat khususnya di desa Siru, karena ini sudah menjadi hal yang turun temurun. Masyarakat tidak heran dalam memilih pemimpin acap kali didasarkan pada identitas”.</i>
3.	Dari empat etnis di desa Siru, etnis apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?	<i>“Etnis Ndahe”.</i>
4.	Secara kuantitas, etnis apa yang memiliki jumlah penduduk dominan di desa Siru?	<i>“Etnis Ndahe”.</i>
5.	Apakah yang menjadi preferensi anda dalam menentukan pilihan dalam pilkades?	<i>“Secara pribadi saya akan memilih sesuai dengan etnis saya. Komitmen yang sudah dibentuk dalam pertemuan tersebut adalah menjadi landasan kuat siapa yang saya dan kami pada umumnya dalam pemilihan”.</i>
6.	Bagaimana tanggapan anda terhadap eksistensi politik	<i>“Karena ini sudah menjadi kebiasaan disini tentu sebagai strategi politik maka biarkan saja terus eksis, pun tidak ada sampai saat ini teguran</i>

	identitas etnis di desa Siru?	<i>dari pihak berwajib”.</i>
7	Apa dampak positifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>:menguatkan ikatan silaturahmi”.</i>
8	Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>“biasanya konflik terjadi pada saat-saat penyelenggaraan pilkades”.</i>
9.	Bagaimana penjelasan konflik di desa Siru pada saat pilkades?	<i>“Ini wewenang tokoh adat disini”.</i>

Nama : Ahmad Esa
 Jabatan : Masyarakat
 Hari/tgl wawancara : Jum'at, 24 Juni 2018
 Tempat : Watu Lendo, desa Siru

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkades di desa Siru	<i>“Memiliki pengaruh”.</i>
2.	Bagaimana peran politik identitas di desa Siru dalam memenangkan kontestasi pilkades?	<i>“Melalui politik identitas, bisa memuluskan tujuan politik masing-masing etnis”.</i>
3.	Dari empat etnis di desa Siru, etnis apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?	<i>“Untuk jabatan kepala desa Siru, perwakilan etnis Ndahese ingkali memenangkan pilkades”.</i>
4.	Secara kuantitas, etnis apa yang memiliki jumlah penduduk dominan di desa Siru?	<i>“Etnis Ndahememang merupakan etnis terbesar di desa Siru, ia mendominasi etnis lainnya.”.</i>
5.	Apakah yang menjadi preferensi anda dalam menentukan pilihan dalam pilkades?	<i>“Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap individu lebih banyak yang memilih berdasarkan etnis termasuk saya”.</i>
6.	Bagaimana tanggapan anda terhadap eksistensi politik identitas etnis di desa Siru?	<i>“Sudah turun temurun dan saya kira masyarakat bisa menerima itu”.</i>
7	Apa dampak positifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>“Bisa menjadi ruang sosialisasi sekaligus momen silaturahmi”.</i>
8	Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas	<i>“Menimbulkan konflik, baik dipicu oleh sikap etnosentrime maupun hal lainnya”.</i>

	tersebut?	
9.	Bagaimana penyelesaian konflik di desa Siru pada saat pilkades?	<i>"Tokoh adat memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik di desa ini"</i> .

Nama : Jumaidin
 Jabatan : Masyarakat
 Hari/tgl wawancara : Jum'at, 24 Juni 2018
 Tempat : Ngalor Kalo, desa Siru

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah politik identitas berpengaruh selama pilkades di desa Siru	<i>"Menurut saya berpengaruh, dengan melihat realitasnya bahwa masyarakat diklasifikasikan berdasarkan etnisitas"</i> .
2.	Bagaimana peran politik identitas di desa Siru dalam memenangkan kontestasi pilkades?	<i>"Hal ini memang tidak bisa dinafikan lagi, momentum pilkades biasanya mengikutsertakan politisasi etnis oleh etnis untuk menjaring massa"</i> .
3.	Dari empat etnis di desa Siru, etnis apa yang seringkali memenangkan kontestasi pilkades?	<i>"Etnis Ndahe"</i> .
4.	Secara kuantitas, etnis apa yang memiliki jumlah penduduk dominan di desa Siru?	<i>"Etnis Ndahe"</i> .
5.	Apakah yang menjadi preferensi anda dalam menentukan pilihan dalam pilkades?	<i>"Memilih itu adalah hak bagi masing-masing konstituen, kecenderungan saya dalam memilih adalah melihat etnis. Ini memang relatif"</i> .
6.	Bagaimana tanggapan anda terhadap eksistensi politik identitas etnis di desa Siru?	<i>"Tanggapan saya sebagai tokoh masyarakat bahwa ini memang merupakan suatu tindakan politis yang mencederai demokrasi, akan tetapi kita tidak bisa melawan paham masyarakat disini yang mana identitas menurutnya adalah sesuatu yang diagungkan. Jadi, susah untuk dibendung dan pada akhirnya ini menjadi suatu pola yang berlangsung terus menerus"</i> .
7	Apa dampak positifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>"Dalam situasi politik yang dinamis tersebut menciptakan suatu situasi solidaritas di dalam etnis, ia kemudian menjadi ruang sosialisasi dan penyatuan atau integrasi"</i> .

8	Apa dampak negatifnya dari penerapan politik identitas tersebut?	<i>“Secara konkrit bahwa memang politik identitas tersebut memunculkan egoisme, suatu sikap yang mana antar etnis berbenturan”.</i>
9.	Bagaimana penyelesaian konflik di desa Siru pada saat pilkades?	<i>“Pertimbangannya adalah bahwa di desa Siru yang menguat sistem budaya maka dalam pemrosesan masalah biasanya diselesaikan oleh Tokoh adat”.</i>

Dokumentasi



Foto tokoh adat desa Siru



Foto saat wawancara dengan tokoh adat desa Siru



Foto saat wawancara dengan tokoh pemuda desa Siru



Foto dengan seorang pemuda desa Siru



Foto dengan beberapa pemuda desa Siru saat selesai wawancara



Foto pelantikan panitia pemilihan kepala desa Siru 2018



Foto pendaftaran calon kepala desa Siru



Foto spanduk pengumuman tanggal pendaftaran kepala desa Siru





Foto konsolidasi calon kepala desa no. 3

RIWAYAT HIDUP



Lukman Yunus, lahir di Buruk, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT pada tanggal 29 September 1996 yang merupakan anak pertama dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan yang berbahagia Bapak Ahmad Encang dan Ibu Siti Hamida. Pendidikan formal dimulai dari MI An-Nur Buruk 2002 dan tamat pada tahun 2008.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Jabal-Nur Watu Lendo dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Labuan Bajo dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar melalui ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).